

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SAMARINDA
TAHUN 2024**



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SAMARINDA
JL. DAHLIA NO. 01 TELP. (0541) 743307
SAMARINDA 75121**

LAKIP

NOMOR : 400.9/598/100.18



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SAMARINDA
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda Tahun 2024.

Penyusunan dokumen LKjIP DP2PA Kota Samarinda Tahun 2024 ini merupakan langkah untuk memenuhi kewajiban organisasi perangkat daerah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Penghargaan yang setinggi tingginya dan ucapan terimakasih kepada seluruh Pegawai DP2PA yang telah menunjukkan dedikasinya yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tanggung jawab masing masing, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati usaha kita bersama dan usaha yang telah di kerjakan bermanfaat bagi pegawai dilingkungan DP2PA pada khususnya, dan masyarakat Kota Samarinda pada umumnya. Akhir kata melalui laporan ini diharapkan pencapaian kinerja DP2PA Kota Samarinda dapat lebih di tingkatkan pada masa mendatang, baik perbaikan pelaksanaan tugas maupun dalam penyempurnaan perencanaan kinerja.

Samarinda, 28 Februari 2025

**Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak**



Dr. Ibnu Araby, MM.Pd
NIP. 196707131991031013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR BAGAN	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Bidang Kewenangan.....	4
C. Aspek Strategik Kota Samarinda	4
D. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	6
E. Sumber Daya Aparatur.....	16
F. Isu-Isu Strategis	18
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	20
B. Visi Misi Pemerintah Kota Samarinda	21
C. Tujuan dan Sasaran Strategis	23
D. Arah Kebijakan, Strategi dan Prioritas Utama Pembangunan Daerah	27
E. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	33
B. Realisasi Anggaran	72
BAB V PENUTUP	74
LAMPIRAN	
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur (Ribu), 2019-2023.....	6
Tabel 2.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Per Desember 2024 ...	16
Tabel 3.	Jumlah PNS Berdasarkan Pangkat/Golongan Per Desember 2024..	17
Tabel 4.	Jumlah Pegawai DP2PA Kota Samarinda Berdasarkan Jenjang Pendidikan Per Desember 2024	17
Tabel 5.	Jumlah Pegawai DP2PA Kota Samarinda Menurut Peta Jabatan Per Desember 2024	17
Tabel 6.	Tujuan dan Sasaran Strategis Jangka Menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026 berdasarkan RPJMD 2021-2026 (Tabel T-C.25, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017).....	24
Tabel 7.	Rencana Strategis Periode Tahun 2021-2026 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.....	25
Tabel 8.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026 untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda (Tabel T-C.26, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017).....	27
Tabel 9.	Perjanjian Kinerja Kepala DP2PA Kota Samarinda Tahun 2024.....	31
Tabel 10.	Pagu Anggaran Program/Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja sampai dengan APBD-P Tahun Anggaran 2024.....	32

Tabel 11.	Skala Nilai Peringkat Kinerja Sasaran	34
Tabel 12.	Hasil Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024	34
Tabel 13.	Skala Nilai Peringkat Kinerja (Tabel T-E.1 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)	37
Tabel 14.	Hasil Pencapaian Kinerja Program Tahun 2024.....	38
Tabel 15.	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Level Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda Tahun 2024 (Tarikan Aplikasi e-Dalev).	45
Tabel 16.	Realisasi Anggaran per Sasaran dan Indikator Tahun 2024.....	72

DAFTAR BAGAN

- Bagan 1. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu media pertanggungjawaban sistematis yang dapat memberikan gambaran tentang keberhasilan maupun kegagalan perangkat daerah terhadap pelaksanaan program kegiatan, serta menggambarkan kemajuan pengevaluasian kinerja secara transparan di setiap penentuan kebijakan dalam pengambilan keputusan. LKjIP berperan sebagai alat kendali, alat penilai dan alat pendorong terwujudnya *good governance* untuk mencapai pemerintahan yang akuntabel, bersih dan bebas dari KKN.

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, apakah tujuan dan sasaran program Tahun 2024 telah mencapai hasil yang diharapkan atau tidak, serta untuk meningkatkan kinerja pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Samarinda, maka perlu disusun laporan dalam bentuk LKjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda Tahun 2024 sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Realisasi yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja ini merupakan hasil pencapaian indikator kinerja pada tahun 2024 baik di level sasaran, program maupun pada level sub kegiatan.

Penyusunan LKjIP DP2PA Kota Samarinda Tahun 2024 berlandaskan kepada :

- 1). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
- 2). Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3). Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 5). Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;

- 6). Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7). Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 9). Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 10). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 11). Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 12). Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 13). Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan;
- 14). Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana di Daerah;
- 15). Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 16). Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda;

- 17). Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 Nomor 4);
- 18). Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 19). Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 903 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda;
- 20). Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2021, tanggal 26 Agustus 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026.
- 21). Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Perubahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4);
- 22). Peraturan Walikota Samarinda Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
- 23). Peraturan Walikota Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda;
- 24). Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tahun 2021-2026.
- 25). Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kota Samarinda Tahun 2021-2026.
- 26). Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tahun 2021-2026.
- 26). Perjanjian Kinerja DP2PA Tahun 2024.

Maksud penyusunan LKjIP DP2PA Kota Samarinda Tahun 2024 adalah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran yaitu tahun 2024 berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Renstra tahun 2021-2026.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

B. Bidang Kewenangan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana dalam pasal 12 disebutkan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibagi menjadi 2 urusan yaitu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar serta urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. DP2PA Kota Samarinda masuk dalam kategori urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar serta bertugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dinas diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.

C. Aspek Strategik Kota Samarinda

Kota Samarinda mempunyai luas wilayah 716.960 KM² dengan letak Geografis antara: 0°30'7.58" LU dan 117°9'13.34" BT. Secara Administratif Kota Samarinda memiliki Batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Muara Badak dan Kecamatan
Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai
Kartanegara

Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara

Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Loa Janan dan Kecamatan Loa
Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Laju pertumbuhan dan dominasi perekonomian yang di dominasi oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran serta sektor jasa-jasa dalam perekonomian Kota Samarinda, memberikan efek langsung terhadap pertumbuhan penduduk yang sebagian besar disebabkan oleh migrasi penduduk. Hal tersebut dikarenakan, kedua sektor tersebut memberikan dampak positif dalam penyerapan tenaga kerja di Kota Samarinda yang

mencapai 74,88% tenaga kerja di sektor perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, jasa keuangan dan asuransi, jasa perusahaan, pemerintahan, jasa Pendidikan, jasa Kesehatan dan kegiatan social seta jasa-jasa lainnya. Berdasarkan data Administrasi Kependudukan Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang tertuang dalam publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) “*Kota Samarinda Dalam Angka 2024*”, Penduduk Kota Samarinda pada tahun 2023 sebanyak 861.878 Jiwa. Sementara itu besarnya rasio jenis kelamin tahun 2023 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 103,56. Kepadatan penduduk di Kota Samarinda tahun 2023 mencapai 1.200,39 jiwa/km². Kepadatan penduduk di 10 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Samarinda Ulu dengan kepadatan sebesar 6.027,62 jiwa/km² dan terendah di kecamatan Palaran sebesar 302,37 jiwa/km².

Penduduk Kota Samarinda mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam sepuluh tahun terakhir. Dari rekapitulasi jumlah penduduk pada tahun 2019 – 2023. Peningkatan jumlah penduduk yang pesat dari tahun ke tahun ini menandakan Kota Samarinda memiliki banyak daya tarik bagi para penduduk di luar daerah, khususnya daya tarik bagi investasi maupun peluang sektor perdagangan. Kondisi ini pula semakin mengukuhkan peran Kota Samarinda sebagai kota jasa.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur (Ribu), 2019-2023.

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten					
Paser	285.89	274.89	278.04	281.14	284.11
Kutai Barat	148.02	171.94	173.75	175.47	177.13
Kutai Kartanegara	786.12	727.61	735.97	746.37	756.79
Kutai Timur	376.11	432.55	440.29	447.94	455.50
Berau	232.29	247.21	250.95	254.66	258.29
Penajam Paser Utara	160.91	178.06	180.59	188.90	197.63
Mahakam Ulu	26.38	32.42	32.87	33.32	33.77
Kota					
Balikpapan	655.18	687.06	694.94	702.60	710.04
Samarinda	872.77	827.07	835.15	843.01	850.63
Bontang	177.72	178.41	180.92	183.37	185.85
Kalimantan Timur	3.721.39	3.757,22	3.803,46	3.856,78	3.909,74

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Samarinda, dalam Publikasi "Kota Samarinda Dalam Angka 2024"

Berdasarkan data Tabel 1. Diatas, jumlah penduduk Kota Samarinda tahun 2023 adalah 850.630 jiwa, dengan demikian Laju Pertumbuhan Penduduk di tahun 2023 adalah $(850.630-843.010)/850.630 \times 100\% = 0.90\%$ naik 0,50 point jika dibandingkan dengan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Samarinda tahun 2022 sebesar 0.40%.

D. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

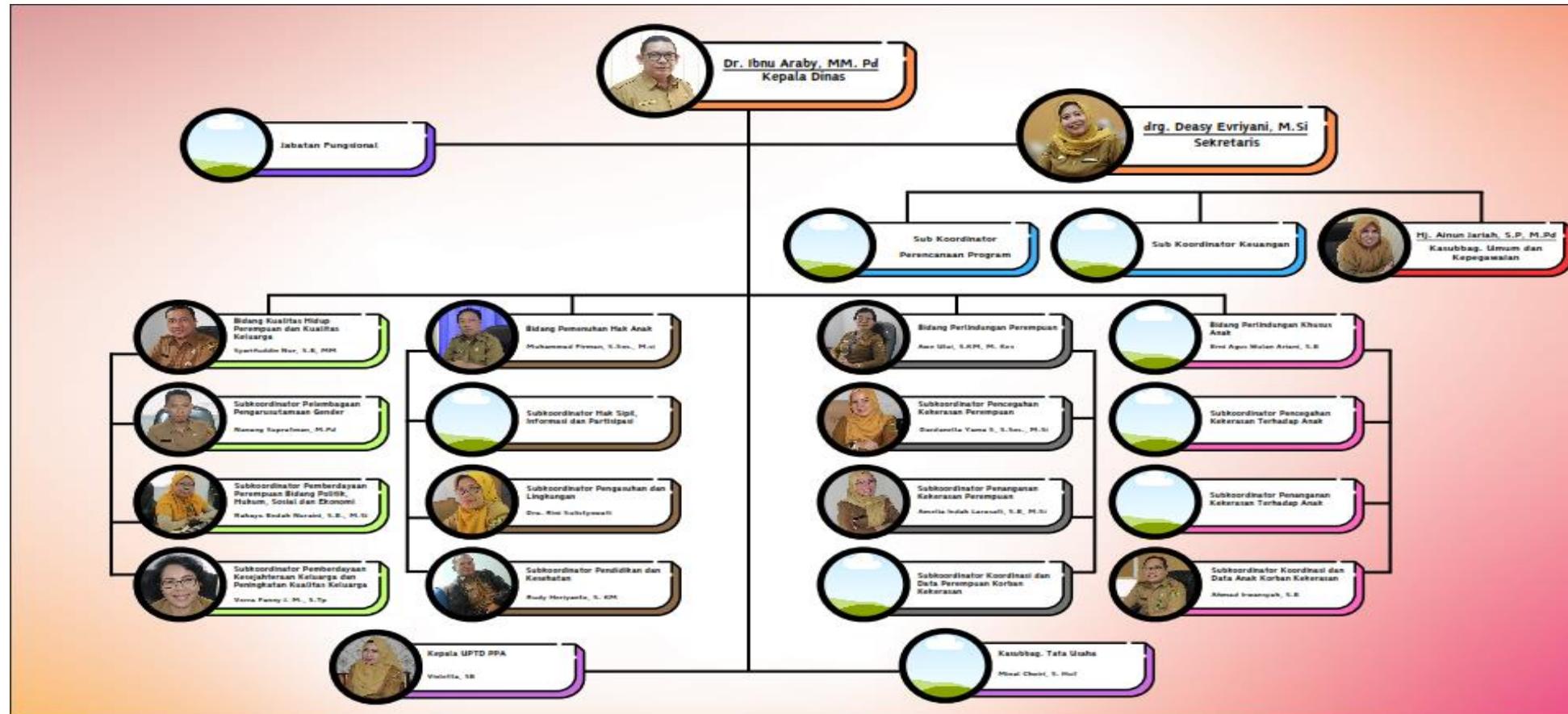
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Samarinda yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda. DP2PA Kota Samarinda merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kualitas Hidup Perempuan, pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak.

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

- 1). **Kepala Dinas.**
- 2). **Sekretariat**, membawahi :
 - a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
- 3). **Bidang Kualitas Hidup Perempuan**, terdiri atas :
Kelompok Jabatan Fungsional
- 4). **Bidang Pemenuhan Hak Anak**, terdiri atas :
Kelompok Jabatan Fungsional
- 5). **Bidang Perlindungan Perempuan**, terdiri atas :
Kelompok Jabatan Fungsional
- 6). **Bidang Perlindungan Khusus Anak**, terdiri atas :
Kelompok Jabatan Fungsional
- 7). **Kelompok Jabatan Fungsional** dan
- 8). **UPTD.**

Bagan 1. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda



Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Pelembagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah tingkat kota;
- d. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat kota;
- e. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah kota;
- f. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat kota;
- g. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat daerah kota;
- h. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kota;
- i. Pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha tingkat daerah kota;
- j. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kota;
- k. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kota;
- l. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan, lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan, lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kota;
- m. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kota;
- n. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah
- o. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas;
- p. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- q. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretariat

Tugas : melaksanakan koordinasi penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan, pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas dan pengelolaan barang milik Daerah serta evaluasi dan pelaporan.

Fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan kesekretariatan;
- b. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi advokasi hukum;
- c. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana;
- d. pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- f. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- g. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, kepustakaan, dan layanan informasi dan pengaduan;
- h. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- i. pengelolaan anggaran dan penerimaan / retribusi;
- j. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- k. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban keuangan;
- l. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- m. fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- n. pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat/pelanggan;
- o. pengelolaan pengaduan masyarakat sesuai tugas fungsi;
- p. pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- q. pengoordinasian pengelolaan data, pengembangan sistem teknologi informasi/ aplikasi untuk aplikasi yang digunakan lintas bidang pada Dinas;
- r. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- s. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- t. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyusun rencana kebutuhan barang dan peralatan serta pendistribusiannya;
- c. melaksanakan urusan persuratan;
- d. mengelola dokumentasi dan kearsipan;
- e. melaksanakan urusan keamanan dan ketertiban kantor;
- f. mengelola kehumasan;
- g. melaksanakan penataan usaha barang, pemeliharaan dan penyimpanan peralatan kantor serta pendataan inventaris kantor;
- h. memfasilitasi penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas;
- i. melaksanakan ketatausahaan, kerumah tanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, pengelolaan kepegawaian;
- j. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas;
- k. melaksanakan penerapan ketentuan tata naskah dinas, tata kearsipan, pakaian dinas, jam kerja dan perjalanan dinas pegawai di lingkungan Dinas;
- l. menyelenggarakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai serta pembinaan disiplin di lingkungan Dinas;
- m. menyelenggarakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai serta pembinaan disiplin di lingkungan Dinas;
- n. melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- o. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- p. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Bidang Kualitas Hidup Perempuan.

Tugas :

Bidang Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas melaksanakan Penyiapan perumusan kebijakan bidang pelebagaan pengarasutamaan gender, bidang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi bidang peningkatan kualitas keluarga serta bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan keluarga.

Fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pelebagaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender,

dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga serta pengembangan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender;

- c. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pelebagaan pegausutamaan gender;
- d. pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender;
- e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pelaksanaan pengarusutamaan gender, bidang pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga dan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender;
- g. pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- h. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Bidang Pemenuhan Hak Anak

Tugas :

Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pelebagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak dan bidang penyedia layanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak.

Fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pelebagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak Anak, dan bidang penyedia layanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak.
- c. Pelaksanaan pelayanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak;
- d. pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data anak;
- e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data anak;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pelebagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas anak dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, bidang penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak dan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender;
- g. pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- h. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Bidang Perlindungan Perempuan.

Tugas :

Bidang Perlindungan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan, bidang penyedia layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan, dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan.

Fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan, bidang penyedia layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan, dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;
- c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan;
- d. pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data perempuan korban kekerasan;
- e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data perempuan korban kekerasan;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pelemagaan pencegahan kekerasan terhadap perempuan, bidang penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyediaan layanan perlindungan perempuan, dan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data perempuan korban kekerasan;
- g. pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- h. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Bidang Perlindungan Khusus Anak.

Tugas :

Bidang Perlindungan Khusus Anak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap anak, bidang penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- c. pelaksanaan koordinasi bidang penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- d. pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data kekerasan terhadap anak;
- e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data kekerasan terhadap anak;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pencegahan kekerasan terhadap anak, bidang penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, pelaporan di bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data kekerasan terhadap anak;
- g. pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- h. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas :

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Sumber Daya Aparatur

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda mempunyai pegawai sebanyak 42 orang, yang terdiri atas 31 PNS , 9 PTTB dan 2 PTTH dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Per Desember 2024

Jumlah Keseluruhan Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian				
No	Status Kepegawaian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	9	22	31
2	Pegawai Tidak Tetap Bulanan	2	7	9
3	Pegawai Tidak Tetap Harian	1	1	2
Total		12	30	42

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Tabel 3. Jumlah PNS Berdasarkan Pangkat / Golongan Per Desember 2024

Jumlah Pegawai Menurut Golongan						
No	Bidang	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat		1	1	1	3
2	Kualitas Hidup Perempuan			1		1
3	Perlindungan Perempuan			1		1
4	Pemenuhan Hak Anak			1		1
5	Perlindungan Khusus Anak			1		1
6	UPTD PPA				2	2
Total		0	1	5	3	9

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Tabel 4. Jumlah Berdasarkan Jenjang Pendidikan Per Desember 2024

Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan							
No	Bidang	Golongan					Jumlah
		SMA	DIPLOMA	S1	S2	S3	
1	Sekretariat	1	2	7	2	1	13
2	Kualitas Hidup Perempuan			8	2		10
3	Perlindungan Perempuan	1	1	3			5
4	Pemenuhan Hak Anak	1	1	3	1		6
5	Perlindungan Khusus Anak		1	4	1		6
6	UPTD PPA			2			2
Total		3	5	27	6	1	42

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Tabel 5. Jumlah Pegawai Menurut Peta Jabatan Per Desember 2024

Jumlah Pegawai Menurut Peta Jabatan		
No	Bidang	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	5
3	Eselon IV	3
4	Fungsional Tertentu	7
	1. Terampil	
	2. Ahli	
5	Pelaksana (ASN dan Non ASN)	26
Total		42

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

F. Isu-isu Strategis

Isu strategis mengacu pada permasalahan yang mungkin memiliki dampak besar terhadap tujuan, kebijakan, atau strategi suatu organisasi atau entitas di masa mendatang. Isu-isu ini seringkali memerlukan perhatian khusus dan pemikiran strategis karena dapat memiliki konsekuensi jangka panjang dan dapat memengaruhi arah dan kinerja keseluruhan suatu organisasi. Isu strategis DP2PA Kota Samarinda dirumuskan berdasarkan hasil tinjauan terhadap isu strategis nasional, isu strategis Provinsi Kalimantan Timur dan kondisi serta karakteristik yang sedang dihadapi saat ini.

Isu strategis DP2PA Kota Samarinda diantaranya:

1. Belum maksimalnya koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi program lintas sektor dalam mengangkat isu gender dan data pilah dalam dokumen perencanaan perangkat daerah;
2. Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam Kewirausahaan;
3. Penurunan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak; dan
4. Penurunan dan Pencegahan Pekerja dan Perkawinan Anak.

G. Sistematika Penyajian.

LKjIP ini mengkomunikasikan capaian kinerja (*performance results*) DP2PA Kota Samarinda Tahun 2024 dengan Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Sistematika penyajian LKjIP DP2PA Kota Samarinda Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, landasan hukum, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dan sistematika penulisan.

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.

Penjelasan secara ringkas tentang Renstra 2021-2026, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, strategi, arah kebijakan dan program, serta Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024, serta Target Pembiayaan / Rencana Aksi Tahun 2024 (Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan).

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Menyajikan informasi tentang capaian tujuan dan sasaran serta hambatan dan langkah – langkah untuk mengatasi masalah masing – masing indikator sasaran, dan perbandingan capaian indikator kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024 dan capaian yang diharapkan di tahun 2025.

BAB IV. PENUTUP

Menjelaskan tentang kesimpulan menyeluruh LKjIP DP2PA Kota Samarinda tahun 2024.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perangkat daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. Perencanaan yang dimaksud adalah suatu proses dalam menentukan tindakan masa depan yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis, desentralistik dan berorientasi pada transparansi dan pemberdayaan masyarakat diperlukan adanya sistem akuntabilitas, dimana salah satunya adalah Dokumen Perencanaan. Dokumen perencanaan yang disusun oleh Pemerintah Daerah menjadi penting sebagai panduan dalam mengarahkan Kebijakan dan Program Kerja. Dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah terkait juga memiliki peran yang besar dalam menyediakan data dan informasi yang diperlukan serta menjalankan program-program yang tertuang dalam RPJMD. Agar tercipta keterpaduan antara Kebijakan dan Program Kerja Pemerintah Daerah dengan Perangkat Daerah diperlukan Dokumen Perencanaan yang disusun oleh Perangkat Daerah dengan berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah dan bersifat indikatif. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Pada tahun 2023 Pemerintah Kota Samarinda melakukan Perubahan RPJMD 2021-2026 dikarenakan beberapa pertimbangan diantaranya adanya perubahan rumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada level pemerintah Kota dan Perangkat Daerah dan peningkatan

integrasi 10 program unggulan ke dalam program pembangunan daerah secara utuh, sebagai strategi untuk mencapai sasaran pembangunan secara efektif, dengan menetapkan indikator sasaran yang relevan untuk masing-masing program unggulan.

Terkait hal tersebut DP2PA Kota Samarinda sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kota Samarinda berkewajiban untuk merevisi isi Renstra sesuai yang tertuang dalam P-RPJMD. Hal ini selaras dengan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Namun perubahan ini baru dapat di aplikasikan pada level Program sehingga hanya target Program yang bisa mengikuti Perubahan Renstra DP2PA 2021-2026, sedangkan pada level sasaran masih menggunakan Renstra DP2PA 2021-2026 sebelumnya.

B. Visi Misi Pemerintah Kota Samarinda

Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2016-2021; memperhatikan hasil analisis isu strategis; mengacu visi dan misi Wali Kota/Wakil Wali Kota Samarinda yang terpilih untuk masa bakti 2021-2026; berpedoman pada RPJPD Kota Samarinda 2005-2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2015; memperhatikan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dalam RPJMD; serta merujuk pada tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, maka visi pembangunan Kota Samarinda Tahun 2021–2026 adalah:

TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN

Penetapan visi tersebut disamping dilandasi oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, juga mempertimbangkan berbagai aspirasi politik yang berkembang di kalangan *stakeholders*

yang ada di Kota Samarinda. Visi tersebut menjadi arah pembangunan 5 (lima) ke depan menuju kondisi ideal yang diinginkan.

Makna dari visi Pemerintah Kota Samarinda dapat di jelaskan sebagai berikut:

Peradaban: Secara harfiah, peradaban berasal dari kata dasar adab yang berarti akhlak, kesopanan atau kehalusan berbudi pekerti. Dan manusia yang tidak mempunyai adab sering dikatakan sebagai biadab. Peradaban didefinisikan sebagai keseluruhan kompleksitas produk pikiran kelompok manusia yang mengatasi negara, ras, suku atau agama yang membedakannya dari yang lain. Beradab setidaknya sebuah masyarakat bersifat relatif dan harus ada norma. Kebutuhan akan adab dengan peradaban mengacu pada masyarakat yang memiliki organisasi sosial, kebudayaan dan cara berkehidupan yang sudah maju yang menyebabkan berbeda dari masyarakat lain.

Peradaban merupakan tahap kebudayaan tertentu dan telah maju yang bercirikan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan lain-lain. Masyarakat memiliki peradaban yang berbeda-beda satu sama lain. Peradaban mengacu pada kehidupan yang nyaman. Indikator peradaban sebagai berikut;

- (1) Organisasi sosial
- (2) Berkebudayaan tinggi
- (3) Cara kehidupan yang sudah maju

Dalam kebudayaan Barat, manusia beradab adalah yang berpendidikan, sopan dan berbudaya. Ciri penting dalam definisi peradaban adalah **berbudaya (cultured)**, antara lain: **melek huruf (lettered)**. Faktor penting dalam pembentukan kebudayaan: (1) Religi, (2) Bahasa, (3) Seni, dan, (4) Ilmu pengetahuan.

Kota pusat peradaban yang menciptakan tatanan politik, ekonomi, dan masyarakat yang harmonis, dan toleran menuju masyarakat madani. MADANI sebagai akronim dari kata maju, berbudaya dan harmoni dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sebuah kota Maju yang ekonomi daerah mandiri ditandai dengan berkembangnya sector ekonomi rakyat yang produktif dan kreatif didukung infrastruktur modern, dengan tata ruang yang aman dan nyaman
2. Samarinda sebagai kota Sungai (*the spirit of river city*) yang berbudaya, ditandai dengan warga sipil dan aparat yang sehat, cerdas dan religious yang menjunjung tinggi etika, moralitas dan kejujuran dalam semangat persatuan dan kegotong royongan yang tinggi

3. Kota yang selalu menjaga hubungan Harmoni antar warga dan warga dengan lingkungan dalam suatu system kemasyarakatan dan lingkungan kota yang asri dan lestari.

Misi merupakan sebuah usaha atau upaya umum bagaimana mewujudkan visi pembangunan dengan cara yang efektif dan efisien sehingga tahapan arah kebijakan terarah menuju satu tujuan yang sama. Berdasarkan visi pembangunan yang telah disebutkan diatas, maka ditetapkan misi pembangunan Kota Samarinda 2021- 2026 sebagai berikut:

- (1) Mewujudkan Masyarakat Kota Yang Religious, Unggul Dan Berbudaya;
- (2) Mewujudkan Perekonomian Kota Yang Maju, Mandiri, Berkerakyatan Dan Berkeadilan;
- (3) Mewujudkan Pemerintahan Yang Professional, Transparan, Akuntabel Dan Bebas Korupsi Dengan Memberi Ruang Bagi Partisipasi Masyarakat ;
- (4) Mewujudkan Infrastruktur Yang Mantap Dan Modern.
- (5) Mewujudkan Lingkungan Kota Yang Aman, Nyaman, Harmoni Dan Lestari

C. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan dan Sasaran Strategis Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2021-2026 yang selaras dengan RPJMD Kota Samarinda 2021-2026 tergambar dalam tabel berikut :

Tabel 6. Tujuan dan Sasaran Strategis Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2026 berdasarkan RPJMD 2021-2026 (Tabel T-C.25, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERA TUJUAN/SASARAN TAHUN KE-				
			1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya akses, kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	68.63	68.65	68.67	68.69	68.70
Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88.28	89.5	90.00	90.05	91.00

Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berfokus untuk mewujudkan kesetaraan gender, meningkatkan kualitas hidup perempuan, serta menjamin hak-hak dan perlindungan bagi anak. Adapun indikator sasaran yang ada pada program ini sebagai berikut:

- a. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
- b. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Adapun uraian singkat dari Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda untuk Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. Rencana Strategis Periode Tahun 2021-2026 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

NO	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	
1	2	3	
1	Core Business (Fungsi Utama) Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Visi		Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Pusat Peradaban

NO	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	
3	Misi	1	Mewujudkan Masyarakat Kota Yang Religious, Unggul Dan Berbudaya
		3	Mewujudkan Pemerintahan Yang Professional, Transparan, Akuntabel Dan Bebas Korupsi
4	Permasalahan	1	Belum maksimalnya koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi program lintas sektor dalam mengangkat isu gender dan data pilah dalam dokumen perencanaan perangkat daerah
		2	Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam Kewirausahaan
		3	Penurunan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
		4	Penurunan dan Pencegahan Pekerja dan Perkawinan Anak
5	Tujuan	1	Meningkatnya akses, kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender
		2	Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat
6	Sasaran	1	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi
		2	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD
7	Strategi	1	1.) Akselerasi, penyediaan sarana prasarana penunjang bagi UMKM dengan penghasilan terbatas 2.) Advokasi pimpinan parpol untuk akselerasi perempuan duduk di legislatif 3.) Identifikasi perempuan bekerja di swasta 4.) Peningkatan kapasitas dan keterampilan perempuan
		2	Terciptanya pelayanan prima bagi masyarakat
8	Arah Kebijakan	1	Menurunkan ketimpangan gender dibidang ekonomi, partisipasi politik dan pengambilan keputusan
		2	Meningkatnya kinerja dan pelayanan OPD
9	Program	1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

NO	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	
		2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

D. Arah Kebijakan, Strategi dan Prioritas Utama Pembangunan Daerah

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2021-2026 untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Samarinda dapat dilihat pada tabel 8 dibawah ini :

Tabel 8. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026 untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda (Tabel T-C.26, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017).

VISI : TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI PUSAT PERADABAN			
MISI I : MEWUJUDKAN MASYARAKAT KOTA YANG RELIGIOUS, UNGGUL DAN BERBUDAYA			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1. Meningkatnya akses, kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	Sasaran 1.1 Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	1.) Akselerasi, penyediaan sarana prasarana penunjang bagi UMKM dengan penghasilan terbatas 2.) Advokasi pimpinan parpol untuk akselerasi perempuan duduk di legislatif 3.) Identifikasi perempuan bekerja di swasta 4.) Peningkatan kapasitas dan keterampilan perempuan	Menurunkan ketimpangan gender dibidang ekonomi, partisipasi politik dan pengambilan keputusan
MISI III : MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG PROFESSIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN BEBAS KORUPSI			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 2. Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat	Sasaran 2.1 Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Terciptanya pelayanan prima bagi masyarakat	Meningkatnya kinerja dan pelayanan OPD

Secara umum, Tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda diambil dari Sasaran 1.1 RPJMD Pemerintah Kota Samarinda, yakni Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi. Lebih lanjut, strategi dan arah kebijakan yang diambil dijabarkan dengan lebih rinci sebagai berikut :

Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda yang akan menjadi fokus dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama lima tahun ke depan adalah:

- 1) Akselerasi, penyediaan sarana prasarana penunjang bagi UMKM dengan penghasilan terbatas;
- 2) Advokasi pimpinan parpol untuk akselerasi perempuan duduk di legislatif;
- 3) Identifikasi perempuan bekerja di swasta;
- 4) Peningkatan kapasitas dan keterampilan perempuan.

Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dalam menyelenggarakan Program Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam lima tahun ke depan yaitu:

- 1) Menurunkan ketimpangan gender dibidang ekonomi, partisipasi politik dan pengambilan keputusan melalui:
 - a) Pendidikan dan pelatihan : Meningkatkan akses perempuan terhadap pendidikan yang setara, serta pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan mereka di sektor ekonomi. Pendidikan yang inklusif akan membantu perempuan untuk lebih kompetitif dan siap untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang pekerjaan dan pengambilan keputusan;
 - b) Menetapkan kebijakan yang mendukung perempuan, guna memastikan representasi yang adil dan setara;
 - c) Implementasi Undang-Undang yang mendukung kesetaraan gender di tempat kerja, penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, serta penciptaan kesempatan yang sama untuk perempuan di sektor-sektor yang di dominasi laki-laki;
 - d) Menyediakan akses yang setara bagi perempuan dalam hal modal, kredit dan peluang untuk berwirausaha;
 - e) Menyediakan fasilitas yang mendukung perempuan dalam mengelola keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga;
 - f) Meningkatkan akses perempuan pada mentoring dan jaringan profesional yang dapat membantu perempuan mengatasi tantangan di tempat kerja atau politik.

- 2) Meningkatnya kinerja dan pelayanan OPD, melalui beberapa langkah strategis, antara lain:
- a) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) : mengembangkan keterampilan dan kompetensi pegawai melalui pelatihan, pendidikan dan pembinaan karakter berkelanjutan;
 - b) Penerapan Teknologi Informasi dan Digitalisasi : mengintegrasikan teknologi informasi untuk mempermudah proses administrasi dan pelayanan publik;
 - c) Penyusunan Perencanaan Yang Tepat dan Efektif : membuat perencanaan yang jelas dan terukur sesuai dengan kebutuhan dan tujuan Perangkat Daerah;
 - d) Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi : meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program dengan menerapkan prinsip transparansi dalam setiap kegiatan Perangkat Daerah;
 - e) Meningkatkan Kolaborasi dan Sinergi Antar Perangkat Daerah : membangun koordinasi dan kerja sama antara berbagai OPD dalam merencanakan dan melaksanakan program yang saling mendukung;
 - f) Fokus pada Kepuasan Masyarakat : mengutamakan kepuasan masyarakat dengan mendengarkan masukan dan keluhan melalui berbagai saluran komunikasi;
 - g) Evaluasi dan Monitoring Kinerja : melakukan evaluasi secara rutin terhadap pelaksanaan program dan layanan yang diberikan, serta memonitor pencapaian hasil yang telah ditargetkan; dan
 - h) Pengembangan Budaya Kerja Yang Positif : menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, dengan mendorong integritas, kerjasama, dan inovasi di antara pegawai.

E. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam rencana kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Dokumen Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang indikator kinerja dan target yang ingin dicapai selama 1 (satu) tahun. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian target yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realitas dengan memperhatikan tujuan dan sasaran serta data pendukung yang harus

disiapkan. Berikut ini disampaikan Perjanjian Kinerja DP2PA Kota Samarinda yang akan dicapai tahun 2024 :

Tabel 9. Perjanjian Kinerja Kepala DP2PA Kota Samarinda Tahun 2024.

No.	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			JUMLAH	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	68.67	Indeks
2	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	IKM	90	Nilai

Rincian pagu anggaran untuk mendukung pelaksanaan Program/Kegiatan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 10. Pagu Anggaran Program/Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja sampai dengan APBD-P Tahun Anggaran 2024

No.	PROGRAM	ANGGARAN	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 1.124.223.260	Rp. 1.177.451.260	APBD 2024
2	Program Perlindungan Perempuan	Rp. 1.191.747.500	Rp. 1.126.147.500	APBD 2024 , DAK 2024
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp. 572.427.000	Rp. 527.727.000	APBD 2024
4	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp. 250.000.000	Rp. 220.000.000	APBD 2024
5	Program Pemenuhan Hak Anak	Rp. 1.120.000.000	Rp. 1.000.480.000	APBD 2024

LKjIP DP2PA Tahun 2024

6	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp. 644.000.000	Rp. 666.675.000	APBD 2024 , DAK 2024
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 7.156.258.900	Rp. 7.648.509.363	APBD 2024
	Total	Rp. 12.058.656.660	Rp.12.366.990.123	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda merupakan dokumen untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program kerja DP2PA Kota Samarinda dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Penyusunan LKjIP ini didasarkan pada pengukuran hasil pelaksanaan perencanaan strategis dan perjanjian kinerja tahunan yang telah ditetapkan pada tahun 2024. Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis, sesuai dengan hasil pengukuran kinerja DP2PA Kota Samarinda. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/Provinsi;
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
8. Pencapaian kinerja yang mendapat apresiasi dari *stakeholder*.
9. Evaluasi capaian kinerja DP2PA.

Pengukuran Tingkat capaian kinerja DP2PA Kota Samarinda tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut dapat digambarkan pada lampiran Pengukuran Kinerja (lampiran 2). Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis, namun demikian di tingkat Program masih terdapat beberapa indikator Program yang belum mencapai target yang telah

ditetapkan. Media pengukuran kinerja terdiri dari Formulir Perjanjian Kinerja dan Pengukuran Kinerja. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian di level Sasaran diberlakukan nilai serta makna dari nilai tersebut, dengan klasifikasi :

Tabel 11. Skala Nilai Peringkat Kinerja Sasaran

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
(1)	$81 \% \leq 100\%$	Baik
(2)	$50 \% \leq 80 \%$	Cukup
(5)	$< 50 \%$	Kurang

Pada Tahun 2023 telah dilaksanakan Revisi atau Perubahan terhadap Dokumen Rencana Strategis (Renstra) DPPKB Kota Samarinda 2021-2026 sebagai tindak lanjut dari Perubahan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Pemerintah Kota Samarinda, sehingga terdapat beberapa penyesuaian pada Sasaran, target Sasaran dan target indikator Program, hanya saja untuk level sasaran baru bisa diaplikasikan di tahun 2024 sehingga khusus pada tahun 2023 ini hanya merevisi target indikator program saja, sehingga sasaran dan indikator pada laporan kinerja ini masih mengacu pada Perjanjian Kinerja sebelumnya.

Tabel 12. Hasil Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator Kinerja	Kategori Ketercapaian Indikator Kinerja		
				Baik ($81 \% \leq 100\%$)	Cukup ($50 \% \leq 80 \%$)	Kurang ($< 50 \%$)
1	Meningkatnya akses, kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	1	√		

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator Kinerja	Kategori Ketercapaian Indikator Kinerja		
				Baik (81 % ≤ 100%)	Cukup 50 % ≤ 80 %	Kurang < 50 %
2	Terciptanya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	1	√		

Berdasarkan capaian diatas, tingkat capaian kinerja sasaran Strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Samarinda dengan tujuan khusus untuk akses, kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender, dapat disimpulkan bahwa nilai peringkat kinerja 2 (Tiga) sasaran strategis memperoleh Kategori “**Baik**”.

Hasil evaluasi dan analisis pencapaian terhadap indikator kinerja pada masing masing sasaran strategis dapat diuraikan pada Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja. Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2024 dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran strategis dengan target Renstra tahun 2021-2026 dapat diuraikan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1	
Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Target Akhir Renstra DP2PA 2021-2026 Tahun 2026
		Target	Realisasi			Target	Realisasi			
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka indeks	68.65	68.71	100.08	Baik	68.67	68.71	100.08	Baik	68.70

Catatan : *) Realisasi IDG Tahun 2024 adalah realisasi tahun 2023 dikarenakan dari BPS belum rilis



Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

- **Pengarusutamaan Gender (PUG)**

Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang digunakan untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan. Tujuan utama PUG adalah mencapai kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, ekonomi, politik, dan kesehatan.

Untuk mengukur capaian program PUG, beberapa indikator yang digunakan antara lain:

- **Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan:** Meningkatnya jumlah perempuan di posisi kepemimpinan dan politik.
- **Akses terhadap Pendidikan dan Pelatihan:** Persentase perempuan yang mengakses pendidikan tinggi dan pelatihan keterampilan.
- **Kesempatan Kerja dan Kesejahteraan Ekonomi:** Keterlibatan perempuan dalam dunia kerja dan kewirausahaan.
- **Kesehatan dan Kesejahteraan:** Penurunan angka kematian ibu, peningkatan layanan kesehatan reproduksi.
- **Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender:** Pengurangan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

- **Indeks terkait penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG)**

Indeks merupakan alat ukur yang digunakan untuk menggambarkan atau menilai suatu kondisi berdasarkan data kuantitatif dan kualitatif. Dalam konteks Pengarusutamaan Gender (PUG), indeks berperan sebagai indikator untuk menilai tingkat kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan partisipasi politik.

Beberapa indeks yang digunakan sebagai indikator PUG antara lain:

1. **Indeks Pembangunan Gender (IPG)**

- Mengukur capaian pembangunan manusia dengan mempertimbangkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam tiga aspek utama: umur harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita.
- Semakin tinggi IPG, semakin kecil kesenjangan gender dalam pembangunan manusia.

2. **Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**

- Mengukur tingkat partisipasi aktif perempuan dalam ekonomi dan politik.
- Mencakup indikator seperti proporsi perempuan dalam parlemen, tenaga profesional, dan jabatan pengambil keputusan.

3. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

- Menilai ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi utama: kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi di pasar tenaga kerja.
- Semakin rendah IKG, semakin baik kondisi kesetaraan gender di suatu wilayah.
- Mengukur tingkat partisipasi aktif perempuan dalam ekonomi dan politik.
- Mencakup indikator seperti proporsi perempuan dalam parlemen, tenaga profesional, dan jabatan pengambil keputusan.
- Mengukur tingkat partisipasi aktif perempuan dalam ekonomi dan politik.
- Mencakup indikator seperti proporsi perempuan dalam parlemen, tenaga profesional, dan jabatan pengambil keputusan.

4. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

- Menilai ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi utama: kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi di pasar tenaga kerja.
- Semakin rendah IKG, semakin baik kondisi kesetaraan gender di suatu wilayah.

• Perhitungan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) :

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indikator yang mengukur tingkat keterwakilan dan peran aktif perempuan dalam tiga aspek utama: **partisipasi ekonomi, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, dan kendali atas sumber daya ekonomi.**

IDG dihitung berdasarkan tiga dimensi utama dengan lima indikator sebagai berikut:

1. Partisipasi Ekonomi:

- Persentase perempuan di tenaga profesional dan teknis
- Persentase perempuan di posisi legislatif, pejabat tinggi, dan manajerial

2. Keterlibatan dalam Pengambilan Keputusan:

- Persentase kursi parlemen yang diduduki perempuan

3. Penguasaan Sumber Daya Ekonomi:

- Pendapatan rata-rata perempuan dibandingkan laki-laki
- Pendapatan per kapita yang disesuaikan

IDG dihitung menggunakan pendekatan distribusi gender dalam berbagai aspek ekonomi dan politik. Secara umum, IDG dinyatakan dalam bentuk indeks yang menunjukkan sejauh mana perempuan

memiliki akses yang setara dengan laki-laki dalam pengambilan keputusan dan kendali ekonomi.

Rumus dasar IDG adalah kombinasi dari perhitungan kesetaraan gender dalam **pendapatan, partisipasi ekonomi, dan keterwakilan politik** dengan pembobotan yang telah ditentukan. Semakin rendah nilai IDG, semakin besar ketimpangan gender dalam akses ekonomi dan pengambilan keputusan.

IDG digunakan sebagai indikator untuk menilai sejauh mana perempuan mendapatkan kesempatan yang setara dengan laki-laki dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Nilai IDG yang tinggi menunjukkan kesetaraan dalam pemberdayaan gender, sedangkan nilai yang rendah menunjukkan **ketimpangan yang perlu diperbaiki melalui kebijakan afirmatif dan pemberdayaan perempuan**.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Kabupaten/ Kota	2021	2022	2023
Samarinda	67,54	68,63	68,71
Kalimantan Timur	66,64	66,89	68,96

Sumber data : BPS Kota Samarinda

Berdasarkan data 2022-2023, tren IDG menunjukkan adanya **peningkatan bertahap**, tetapi masih terdapat kesenjangan gender yang cukup signifikan dalam beberapa aspek.

- **Peningkatan keterlibatan perempuan dalam sektor profesional** seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial.
- **Kenaikan jumlah perempuan dalam posisi manajerial**, tetapi masih jauh lebih sedikit dibandingkan laki-laki.
- **Pendapatan perempuan masih lebih rendah daripada laki-laki**, terutama di sektor formal.

Meski IDG mengalami perbaikan dari tahun 2022 ke tahun 2023, perempuan masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan sosial yang membatasi kesempatan mereka dalam pengambilan keputusan dan kendali atas sumber daya ekonomi.

Pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2024 di Kota Samarinda, dari total 45 kursi DPRD yang tersedia, hanya 4 kursi (8,88%) yang berhasil diduduki oleh perempuan. Angka ini masih jauh dari target keterwakilan perempuan sebesar 30% yang diharapkan dan lebih rendah dari periode sebelumnya sebesar 15,5%

Rendahnya keterwakilan perempuan ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan signifikan dalam mendorong partisipasi perempuan di bidang politik di Kota Samarinda. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan dukungan dan partisipasi perempuan dalam politik lokal guna mencapai keseimbangan representasi gender yang lebih baik.

Sasaran Strategis 2
Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Target Akhir Renstra DP2PA 2021-2026 Tahun 2026
		Target	Realisasi			Target	Realisasi			
Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	89.5	87.65	97.93	Baik	90.0	98.5	109.4	Baik	91



Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Pelayanan Publik (*Public Services*) oleh birokrasi publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat disamping sebagai abdi negara. Sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, setiap instansi pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Evaluasi tersebut dilakukan melalui tindakan survei, yaitu Survey Kepuasan Masyarakat. Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat merupakan suatu keharusan bagi lembaga penyelenggara layanan kepada masyarakat secara umum. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 16 Tahun 2014, tertanggal 2 Mei 2014, mengatur tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Di dalam prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut terdapat 9 ruang lingkup yang dijadikan dasar pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat, yaitu: Persyaratan,

prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, maklumat pelayanan serta penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Pada tahun 2023 berdasarkan hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat DP2PA diperoleh nilai 87.65 dari target 89.5, dengan capaian kinerja 97.93%. Di tahun 2024 hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat DP2PA memperoleh nilai 98.5 dari target 90 dengan capaian kinerja 109.4% dan memperoleh kriteria “**Baik**”. Tentunya diperlukan usaha yang lebih giat lagi bagi DP2PA untuk mengejar target akhir nilai IKM sebesar 91 di tahun 2026 seperti yang tertuang dalam dokumen perubahan Renstra DP2PA Kota Samarinda 2021-2026. Terjadinya peningkatan kinerja dalam capaian nilai IKM yang diperoleh DP2PA dikarenakan DP2PA terus mengedepankan pelayanan publik yang baik dalam setiap kegiatan yang dilakukan baik itu pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak maupun penyelenggaraan kegiatan lainnya kepada masyarakat. Adapun responden dari survei ini adalah internal pegawai DP2PA sendiri maupun masyarakat di luar DP2PA Kota Samarinda.

Selanjutnya pada level Program, untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian program/kegiatan diberlakukan nilai serta makna dari nilai tersebut. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 kriteria penilaian realisasi kinerja perangkat daerah adalah sebagai berikut :

**Tabel 13. Skala Nilai Peringkat Kinerja
(Tabel T-E.1 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)**

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
(1)	91 % ≤ 100%	Sangat Tinggi (ST)
(2)	76 % < 90 %	Tinggi (T)
(3)	66 % ≤ 75%	Sedang (S)
(4)	51 % ≤ 65 %	Rendah (R)
(5)	≤ 50 %	Sangat Rendah (SR)

Pada Tahun 2023 telah dilaksanakan Revisi atau Perubahan terhadap Dokumen Renstra DP2PA Kota Samarinda 2021-2026 sebagai tindak lanjut dari Perubahan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Pemerintah Kota Samarinda, sehingga terdapat beberapa penyesuaian pada Sasaran, target Sasaran dan target indikator Program,

hanya saja untuk level sasaran baru bisa diaplikasikan di tahun 2024.

Tabel 14. Hasil Pencapaian Kinerja Program Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Program	Jumlah Indikator Kinerja	Kategori Ketercapaian Indikator Kinerja				
					Sangat Tinggi (91 % ≤ 100%)	Tinggi (76 % ≤ 90%)	Sedang (66 % ≤ 75%)	Rendah (51 % ≤ 65 %)	Sangat Rendah (≤ 50 %)
1	Meningkatnya akses, kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Program Pengarusutamaan Gender dan pemberdayaan perempuan	1	√				
			Program Pemberdayaan Perempuan	1	√				
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	1	√				
			Program Pemenuhan Hak Anak	1	√				
			Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	1	√				
			Program Perlindungan Khusus Anak	1	√				
2	Terciptanya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	√				

Berdasarkan capaian diatas, tingkat capaian kinerja Program dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Samarinda dengan tujuan khusus untuk meningkatnya akses, kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender dan Terciptanya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat, dapat disimpulkan bahwa nilai peringkat kinerja 7 (Tujuh) Program memperoleh Kategori “**Sangat Tinggi**”.

Hasil evaluasi dan analisis pencapaian terhadap indikator kinerja pada masing masing Program dapat diuraikan pada Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja. Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja program yang telah dicapai pada tahun 2024 dengan membandingkan antara target dan realisasi pada Program dengan target Provinsi maupun Nasional diuraikan sebagai berikut:

Program 1
Program Pengarusutamaan Gender dan pemberdayaan perempuan

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Capaian Provinsi Kaltim Tahun 2024	Capaian Nasional Tahun 2024
		Target	Realisasi			Target	Realisasi				
Capaian Keterwakilan Perempuan di perlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan	Angka Indeks	68.65	68.71	100.08	ST	68.67

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Samarinda

Capaian Keterwakilan Perempuan Di Parlemen, Perempuan Sebagai Tenaga Profesional Dan Sumbangan Pendapatan Perempuan

Indikator capaian dalam pemberdayaan perempuan dapat diukur melalui beberapa aspek utama, yaitu keterwakilan perempuan di parlemen, jumlah perempuan sebagai tenaga profesional, dan sumbangan pendapatan perempuan. Berikut adalah indikator yang digunakan untuk mengukur masing-masing aspek tersebut:

1. Keterwakilan Perempuan di Parlemen

Indikator yang digunakan:

Persentase kursi yang ditempati perempuan di parlemen (DPR, DPD, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota). Jumlah perempuan dalam kepemimpinan politik, seperti menteri, kepala daerah, atau pejabat struktural di pemerintahan. Dan tren peningkatan keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif dari tahun ke tahun.

2. Perempuan sebagai Tenaga Profesional

Indikator yang digunakan:

Persentase perempuan yang bekerja di sektor profesional dan teknis, seperti dokter, insinyur, pengacara, akademisi, dan manajer, Rasio perempuan dan laki-laki dalam jabatan manajerial dan kepemimpinan di perusahaan atau organisasi, Jumlah perempuan dalam posisi strategis di sektor publik dan swasta dan akses perempuan terhadap pendidikan tinggi dan pelatihan keterampilan profesional.

3. Sumbangan Pendapatan Perempuan

Indikator yang digunakan:

Persentase pendapatan perempuan terhadap pendapatan rumah tangga, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan, dibandingkan dengan laki-laki, upah rata-rata perempuan dibandingkan laki-laki dalam sektor formal dan informal dan kontribusi perempuan dalam kewirausahaan dan sektor ekonomi kreatif.

Indikator-indikator ini digunakan dalam berbagai laporan nasional maupun internasional untuk menilai kemajuan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di suatu negara.

Program 2	
Program Pemberdayaan Perempuan	

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Capaian Provinsi Kaltim Tahun 2024	Capaian Nasional Tahun 2024
		Target	Realisasi			Target	Realisasi				
persentase kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	persen	0.038 %	0.0159% (Rasio)		ST	0.036 %	0.036 %	100	ST	25.483,87 %	0.031 %

✚ Persentase Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO

Kekerasan terhadap perempuan merupakan isu yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, baik di tingkat nasional maupun daerah. Bentuk kekerasan yang dialami perempuan dapat berupa kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi, yang sering kali terjadi di dalam lingkungan domestik maupun publik. Data menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan masih tinggi dan terus meningkat setiap tahunnya, yang memerlukan langkah-langkah strategis dan konkret untuk mencegah serta menanggulangi permasalahan ini.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda khususnya Bidang Perlindungan Perempuan bekerja secara continue dan Proaktif dengan perkembangan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Samarinda. Namun jumlah kasus kekerasan yang terjadi di Kota Samarinda selalu meningkat tajam dan Kota Samarinda menjadi salah satu kota tertinggi jumlah kasus kekerasan terhadap Perempuan.

Dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan, Pemerintah Kota Samarinda telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan program yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi perempuan. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya, serta hambatan budaya dan sosial yang menghambat efektivitas program pencegahan.

Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, Pemerintah Vertikal, media massa, organisasi masyarakat, dan sektor swasta, agar kebijakan dan program yang telah dirancang dapat berjalan secara efektif dan efisien. Kegiatan koordinasi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan serta memastikan bahwa langkah-langkah pencegahan dapat diterapkan dengan lebih optimal di tingkat kabupaten/kota.

Program 3	
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Capaian Provinsi Kaltim Tahun 2024	Capaian Nasional Tahun 2024
		Target	Realisasi			Target	Realisasi				
persentase perkawinan anak	persentase	1,95 %			ST	1,90 %	1,90 %	100	ST	...	8,74 %

Persoalan perempuan dan anak menjadi persoalan bangsa Indonesia, dimana perempuan dan anak rentan terjadinya kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan dan anak sering terjadi kapan saja dan dimana saja. Kekerasan yang di dapatkan korban dapat berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, trafficking, penelantaran dan lainnya. Hal ini terjadi akibat belum terwujudnya kesetaraan gender. Berbagai ketidakadilan atau kesenjangan gender terjadi di berbagai aspek mulai dari ranah domestic atau keluarga maupun di area public yang menimbulkan banyak kerugian

bagi kita semua. Upaya mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak dapat dimulai dari kelompok terkecil masyarakat yaitu keluarga. Relasi setara dalam keluarga perlu dibangun, dapat memberikan dampak positif dalam pembangunan berkelanjutan. Mengingat Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang- Undang. Dan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Permasalahan tingginya angka perkawinan usia anak di Kota Samarinda berdasarkan *data dari Pengadilan Agama Samarinda Kelas I-A* tentang Jumlah Pengajuan Dispensasi Perkawinan Usia Anak sejak tahun 2021 - 2023 sebanyak 508 orang. Perkawinan usia anak merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap kesehatan fisik dan kesehatan mentalnya.

Untuk menjawab berbagai permasalahan, perlu dilakukan upaya atau program-program pencegahan dan pembinaan sehingga kedepan diharapkan tingkat keharmonisan dalam keluarga dapat terus meningkat dan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat terus menurun agar dapat melahirkan generasi emas yang kokoh, berdaya saing, salah satu Program yang dilaksanakan pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda adalah Program Peningkatan Kualitas Keluarga.

	Program 4
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Capaian Provinsi Kaltim Tahun 2024	Capaian Nasional Tahun 2024
		Target	Realisasi			Target	Realisasi				
Jumlah Dokumen Data Pilah Gender dan Anak	Dokumen	4			ST	4	4	100	ST	2	2

Data gender dan anak menjadi elemen pokok bagi terselenggaranya PUG dalam pemenuhan hak laki-laki, Perempuan dan anak di berbagai bidang pembangunan, mulai dari

tahap perencanaan, penganggaran, Impelementasi sampai dengan evaluasi program atau pengukuran pencapaian kinerja pembangunan. Data dan informasi Gender dan Anak merupakan sesuatu yang tidak statis tetapi bersifat dinamis dan selalu berubah-ubah, maka dari itu data dan informasi harus selalu di evaluasi dan diperhatikan perubahannya.

Sistem Informasi Gender dan anak bertujuan untuk menyediakan informasi terkini tentang perempuan dan anak, serta tersedianya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan terisolasinya data dan informasi terkini sebagai pembuka wawasan untuk mengetahui isu gender di berbagai bidang.

Sistem data gender dan anak (SIGA) adalah pelembagaan penyelenggaraan data gender dan anak yang terdiri dari komponen-komponen peraturan, lembaga, dan mekanisme di kementerian/lembaga/daerah dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan hasil-kebijakan/ program/ kegiatan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak serta mewujudkan kesetaraan dan keadilan dimana kesamaan dan kondisi adil bagi laki laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia. Pengelolaan data yang dilakukan setiap Kabupaten/Kota terpilahnya menurut jenis kelamin, sehingga dapat dilakukan analisis gender untuk mengetahui apakah ada perbedaaan posisi dan kondisi atau status dan kedudukan antara laki laki dan perempuan dibarbagai bidang pembangunan.

Berpijak dari nalar diatas, dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender dan menjalankan strategi Pengarusutamaan Gender, pemerintah Kota Samarinda melalui kebijakan dan program pembangunan berusaha mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program-program pembangunan nasional. Sebab itu, diperlukan data, fakta dan informasi tentang isu gender, seperti data terpilah antara laki-laki dan perempuan baik anak, dewasa, lansia, difabel yang dapat menggambarkan kesenjangan gender menjadi dasar penyusunan profil gender dan anak di Kota Samarinda. Penyusunan profil gender dan anak tersebut dirasa sangat penting karena dengan tersedianya data terpilah, maka akar rumput permasalahan kesenjangan dalam pembangunan dapat diketahui, sehingga dapat disusun langkah afirmatif yang tepat sasaran. Untuk memudahkan memperoleh data terpilah tersebut pada organisasi perangkat daerah di Kota Samarinda maka koordinasi perlu di tingkatkan sehingga tersedia data terpilah secara akurat dan akuntabel. Sehingga penyelenggaraan sistem data gender dan anak akan berhasil dengan baik apabila terdapat dukungan dan partisipasi semua pihak dalam mewujudkan ketersediaan dan pemanfaatan data gender dan anak di berbagai bidang pembangunan.

Program 5	
Program Pemenuhan Hak Anak	

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Capaian Provinsi Kaltim Tahun 2024	Capaian Nasional Tahun 2024
		Target	Realisasi			Target	Realisasi				
Kota Layak Anak	poin	700 s/d 800	797			800 s/d 900	846.37		ST		

Program 6	
Program Perlindungan Khusus Anak	

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Capaian Provinsi Kaltim Tahun 2024	Capaian Nasional Tahun 2024
		Target	Realisasi			Target	Realisasi				
persentase kasus kekerasan terhadap anak	Persentase	1.80 %			ST	1.70 %	0.0547	3.22	R		

Program 7	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Capaian Provinsi Kaltim Tahun 2024	Capaian Nasional Tahun 2024
		Target	Realisasi			Target	Realisasi				
IKM	Nilai	89.5	81.68		T	90	91.15	101.28	ST		

Berdasarkan Permenpan-RB nomor 14 Tahun 2017 yang dimaksud dengan Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Survei

Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dengan dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

Terjadinya peningkatan kinerja dalam capaian nilai IKM yang diperoleh DP2PA dikarenakan DP2PA terus mengedepankan pelayanan publik yang baik dalam setiap kegiatan yang dilakukan baik itu pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak maupun penyelenggaraan kegiatan lainnya kepada masyarakat.

Selanjutnya pada level Kegiatan dan Sub Kegiatan, beserta faktor pendukung dan penghambat capaian kinerja tahun 2024 beserta predikat kinerjanya dapat dilihat pada tabel 15 berikut :

Tabel 15. Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Level Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2024 (Tarikan Aplikasi e-Dalev).

Kode (Perangkat Daerah/ Usus/ Bidang Usus/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Usus/ Bidang Usus Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu -2023		Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
			K	Rp	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			-1	-1	-1	-2	-2	-2	-3	-3	-3	-4	-4	-4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2.08.2.13.0.00.04.0000		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda																						
2.08.2.13.0.00.04.0000	2.8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			9,010,650,298		12,366,990,123		1,645,074,614		2,590,694,216		2,688,271,134		4,741,336,530		11,665,376,494		20,676,026,792	99.56	94.33			
2.08.2.13.0.00.04.0000	2.8.2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			759,009,196		1,177,451,260		35,700,219		191,763,400		229,711,172		650,401,569		1,107,576,360		1,866,585,556	100	94.07			
2.08.2.13.0.00.04.0000	2.8.2	Capaian Keterwakilan Perempuan di perlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan					68,67 Angka Indeks		0		0		68.67		0		68.67						100	
		Faktorisasi Program Triwulan 1:					capaian masih dalam progres																	
		Faktorisasi Program Triwulan 2:					capaian sesuai target pada Triwulan 2																	
		Faktorisasi Program Triwulan 3:					Target tercapai																	
		Faktorisasi Program Triwulan 4:					tercapai sesuai rencana kerja tw 4																	
2.08.2.13.0.00.04.0000	2.8.2.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			313,308,398		519,895,460		20,737,219		150,503,400		142,429,843		184,616,569		498,287,031		812,195,429	100	95.84			
2.08.2.13.0.00.04.0000	2.8.2.2.01	Jumlah Dokumen Pelebagaan PUG					3 Dokumen		1		1		1		0		3					100		
2.08.2.13.0.00.04.0000	2.8.2.2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota			3	48,000,000	103,223,460	PAD	0	PAD	51060000	PAD	44404000	PAD	7480000		102,944,400		150,944,400	100	99.73			
2.08.2.13.0.00.04.0000	2.8.2.2.01	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota					3 Dokumen		1		1		1		0		3					100		
		Uraian/Keterangan T1:					1. Membuat Perencanaan Kegiatan (RKA, Rencana Kerja POKIA PUG) 2. Membuat Draft Rencana Kerja POKIA PUG Tahunan.		PAD		0													
		Uraian/Keterangan T2:					Kegiatan Rapat Koordinasi Focal Point PD POKIA PUG tanggal 08 Mei 2024		PAD		4260000													
		Uraian/Keterangan T2:					Kegiatan Rapat Koordinasi POKIA PUG tanggal 20 Mei 2024		PAD		23400000													
		Uraian/Keterangan T2:					Kegiatan Rapat Koordinasi Pra Evaluasi PUG 2024 kota Samarinda tanggal 13 Juni 2024		PAD		23400000													
		Uraian/Keterangan T3:					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak		PAD		4244000													
		Uraian/Keterangan T3:					Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG di Kecamatan Palaran tanggal 11 September 2024		PAD		42600000													
		Uraian/Keterangan T3:					Paket Meeting halfday Seminar Gender Mainstreaming dan Launching Layanan PUTARAN		PAD		39780000													
		Uraian/Keterangan T4:					Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan]		PAD		74800000													

LKjIP DP2PA Tahun 2024

Kode (Perangkat Daerah/ Ususan/ Bidang Ususan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Ususan/ Bidang Ususan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu -2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)			Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			-1	-1	-1	-1	-2	-2	-2	-3	-3	-3	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4
	Faktor Pendukung T1 :		1) Dukungan Pimpinan 2) Ketersediaan data Kegiatan tahun 2023																								
	Faktor Penghambat T1 :		Kegiatan Perencanaan Tahunan POKIA berjalan lancar																								
	Faktor Pendukung T2 :		Ketersediaan Dana, Perencanaan yang Matang dan Dukungan Stakeholder																								
	Faktor Penghambat T2 :		Padatnya Kegiatan Anggota Tim Driver																								
	Faktor Pendukung T3 :		Komitmen Pimpinan Perangkat Daerah (Anggota POKIA PUG)																								
	Faktor Penghambat T3 :		Anggota Masyarakat anggota Ormas pada Kelurahan yang lokasinya cukup jauh membuat kegiatan dipusatkan di Kecamatan																								
	Faktor Pendukung T4 :		Anggaran Tersedia																								
	Faktor Penghambat T4 :		Kegiatan berjalan lancar																								
2.08.2.13.0.00.04.0000	2.8.2.2.01.3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG		40	265,908,398	241,672,000	PAD		1442149	PAD		76136600	PAD		8675443	PAD		125438469		224,671,931		490,580,329	100	92.97			
2.08.2.13.0.00.04.0000	2.8.2.2.01.3	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota		40	Perangkat Daerah			1			20			19			0		40				100				
	Uraian/Keterangan T1 :		1) Penyusunan Rencana Kegiatan (RKA) 2) Advokasi Internal DP2PA dalam bentuk Evaluasi PPRG																								
	Uraian/Keterangan T2 :		Kegiatan Rapat Koordinasi Focal Point PD POKIA PUG Kota Samarinda tanggal 08 Mei 2024																								
	Uraian/Keterangan T2 :		Kegiatan Rapat Koordinasi POKIA PUG Kota Samarinda tanggal 20 Mei 2024																								
	Uraian/Keterangan T2 :		Kegiatan Rapat Koordinasi Pra Evaluasi PUG 2024 Kota Samarinda tanggal 13 Juni Mei 2024																								
	Uraian/Keterangan T2 :		Mengikuti Bimtek Tot PPRG di Surakarta																								
	Uraian/Keterangan T2 :		Kegiatan Rapat Penyusunan Informasi Geospasial Gender tanggal 26 Juni 2024																								
	Uraian/Keterangan T2 :		Kegiatan Rapat Penyusunan ARG tanggal 27 Juni 2024																								
	Uraian/Keterangan T3 :		Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor																								
	Uraian/Keterangan T3 :		HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PANITIA																								
	Uraian/Keterangan T3 :		Honorarium Rohaniwan																								
	Uraian/Keterangan T3 :		Belanja Paket Meeting halfday Rapat Koordinasi Penyusunan Informasi Geospasial gender Tahun 2024 dan Rapat Koordinasi Penyusunan ARG (Anggaran Responsif Gender) Tahun 2024 tanggal 26 s/d 27 Juni 2024																								

LkjIP DP2PA Tahun 2024

Kode (Perangkat Daerah/ Ususan/ Bidang Ususan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Ususan/ Bidang Ususan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu -2023		Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)				
			K	Rp	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	Uraian/Keterangan T3:	Belanja Kursus/Singkat/Pelatihan - Peningkatan Kapasitas SDM						PAD			200000																
	Uraian/Keterangan T3:	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah						PAD			8675443																
	Uraian/Keterangan T4:	Kegiatan Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2024 [Belanja Makanan dan Minuman Rapat]						PAD			24480000																
	Uraian/Keterangan T4:	Bimtek PUG/PPRG Anggota POKIA 2024 [Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia]						PAD			19600000																
	Uraian/Keterangan T4:	Advokasi PUG Bagi Kecamatan dan Kelurahan [Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia]						PAD			2700000																
	Uraian/Keterangan T4:	Konsultasi ke Kementerian PPPA [Belanja Perjalanan Dinas Biasa]						PAD			9012000																
	Uraian/Keterangan T4:	Advokasi PUG Bagi Kecamatan dan Kelurahan [Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota]						PAD			23400000																
	Uraian/Keterangan T4:	Advokasi PUG Bagi Dunia Usaha dan Industri [Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota]						PAD			23400000																
	Faktor Pendukung T1:	1) Dukungan Pimpinan dan Pelaksana Kegiatan 2) Data ARG Kegiatan Tahun sebelumnya																									
	Faktor Penghambat T1:	Advokasi PUG/PPRG pada TW 1 prioritas internal DP2PA																									
	Faktor Pendukung T2:	Dukungan Pimpinan Perangkat Daerah																									
	Faktor Penghambat T2:	Kendala Teknis dan Kurangnya SDM untuk mengolah data spasial yang telah dikumpulkan pada Target Inovasi Geospasial Responsif Gender																									
	Faktor Pendukung T3:	Komitmen Pimpinan Perangkat Daerah, Focal Point Perangkat Daerah (Tenaga terlatih PPRG)																									
	Faktor Penghambat T3:	Pengumpulan Data Pendukung Geospasial Responsif Gender memerlukan penyempurnaan Dokumentasi yang diambil oleh Kecamatan																									
	Faktor Pendukung T4:	Koordinasi yang efektif antara anggota POKIA PUG, Vocal Point, dan Stakeholder																									
	Faktor Penghambat T4:	Kegiatan berjalan sesuai target																									
2.08.2.13.0.00.04.0000	2.8.2.2.01.4	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG				0	175,000,000	PAD			6315800	PAD			23306800	PAD			89950000	PAD			51698100	170,670,700	170,670,700	100	97.53
2.08.2.13.0.00.04.0000	2.8.2.2.01.4	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/kota				20			1				9				10		0		20					100	
	Uraian/Keterangan T1:	1) Membuat Rencana Anggaran Kegiatan (RKA) 2) Membuat Desain Media Sosialisasi (Leaflet) 3) Membuat Desain Buku Saku PUG						PAD																			
	Uraian/Keterangan T2:	Belanja Alat Tulis Kantor						PAD			6315800																
	Uraian/Keterangan T2:	Belanja Bahan Cetak - Bahan Promosi PUG						PAD			23080000																
	Uraian/Keterangan T3:	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak						PAD			6750000																
	Uraian/Keterangan T3:	HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PANITIA KEGIATAN SEMINAR GENDER MAINSTREAMING DAN LAUNCHING PUTARAN TANGGAL 23 JULI 2024						PAD			11300000																
	Uraian/Keterangan T3:	Belanja Paket Meeting Halfday - Kegiatan Seminar Gender Mainstreaming dan Launching PUTARAN tanggal 23 Juli 2024						PAD			70200000																
	Uraian/Keterangan T4:	Penanggungjaban Pengelola Keuangan [Belanja Honorarium Penanggungjaban Pengelola Keuangan]						PAD			6250000																
	Uraian/Keterangan T4:	Bahan Cetak (Piagam, Bingkai, Spanduk)						PAD			3020000																
	Uraian/Keterangan T4:	Honorarium narsum, Moderator						PAD			4750000																
	Uraian/Keterangan T4:	Jasa Tim Ahli (Juri Gender Champion)						PAD			5000000																
	Uraian/Keterangan T4:	Perjalanan Dinas Biasa						PAD			17278100																
	Uraian/Keterangan T4:	Paket Hadiah Gender Champion						PAD			15000000																

LKjIP DP2PA Tahun 2024

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RPJMD Kota Tahun Lalu -2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)			Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Faktor Pendukung T1 :		1) Dukungan Pimpinan dan Rekan Kerja 2) Perangkat yang memadai																								
	Faktor Penghambat T1 :		Keterbatasan SDM sehingga pada TW 1 Fokus pada persiapan bahan sosialisasi																								
	Faktor Pendukung T2 :		Dukungan Pimpinan Perangkat Daerah dan Terlaksananya Kegiatan																								
	Faktor Penghambat T2 :		Kurangnya SDM sehingga hanya mampu menyelesaikan desain dan cetak Leaflet dan Desain Buku Saku PUG																								
	Faktor Pendukung T3 :		Dukungan para pihak (Dunia Usaha, Media Massa, Perguruan Tinggi, Komunitas, dan Lembaga Masyarakat)																								
	Faktor Penghambat T3 :		Kurangnya waktu persiapan untuk memaksimalkan Data Dunia Usaha dari Disnaker																								
	Faktor Pendukung T4 :		Anggaran, Koordinasi Lintas Sektor																								
	Faktor Penghambat T4 :		Waktu Penjaringan Kandidat Gender Champion perlu diperpanjang untuk memaksimalkan persiapan kandidat dalam proses penilaian																								
Rata-rata capaian kinerja (%)																								100	95.84		
Predikat Kinerja																								ST	ST		
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	2	2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	445,100,798	433,356,000			14,963,000			5,760,000			41,048,329			324,748,400			388,519,729			833,620,527	100	89.85
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	2	2.02	Jumlah ketewakilan Perempuan di Parlemen, Perempuan sebagai tenaga Manajerial dan Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan kerja	250 Orang		0		50		200		0		250										100	
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	2	2.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	25	445,100,798	433,356,000	PAD		14963000	PAD		5760000	PAD	43048329	PAD		324748400			388,519,729			833,620,527	100	89.85
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	2	2.02	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Organisasi		0		10		0		0		10										100	
	Uraian/Keterangan T1 :																										
	Uraian/Keterangan T2 :	Makanan dan Minuman Pertemuan Rutin Peningkatan Kapasitas Perempuan Bulan Mei																									
	Uraian/Keterangan T2 :	Makanan dan Minuman Pertemuan Rutin Peningkatan Kapasitas Perempuan Bulan Juni																									
	Uraian/Keterangan T3 :	ATK																									
	Uraian/Keterangan T3 :	cetak Spanduk																									
	Uraian/Keterangan T3 :	Belanja makan minum pertemuan rutin peningkatan kapasitas perempuan (makan minum rapat)																									
	Uraian/Keterangan T3 :	Honorarium tenaga ahli (narsum,moderatur, pembawa acara)																									
	Uraian/Keterangan T3 :	Honorarium Rohaniwan																									
	Uraian/Keterangan T3 :	perjalanan Dinas biasa																									
	Uraian/Keterangan T3 :	Paket meeting dalam kota																									
	Uraian/Keterangan T3 :	paket meeting dalam kota																									
	Uraian/Keterangan T3 :	Belanja modal personal komputer																									
	Uraian/Keterangan T4 :	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota [Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota]																									
	Uraian/Keterangan T4 :	Belanja Hadiah Bersifat perombaan																									
	Uraian/Keterangan T4 :	Printer / Scanner A3																									
	Uraian/Keterangan T4 :	Belanja perjalanan dinas biasa																									
	Uraian/Keterangan T4 :	Belanja kontribusi kursus pelatihan dan bimtek																									
	Uraian/Keterangan T4 :	Belanja jasa juri perombaan/pertandingan																									
	Uraian/Keterangan T4 :	Belanja perjalanan dinas biasa																									
	Uraian/Keterangan T4 :	9 Advokasi Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Politik , Hukum dan Sosial [Belanja Jasa Tenaga Ahli]																									
	Uraian/Keterangan T4 :	Honorarium Rohaniwan [Honorarium Rohaniwan]																									
	Uraian/Keterangan T4 :	Honorarium Tenaga Ahli /Instruktur/Narasumber [Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia]																									
	Uraian/Keterangan T4 :	Belanja Makanan dan Minuman Pertemuan Rutin Peningkatan Kapasitas Perempuan [Belanja Makanan dan Minuman Rapat]																									
	Uraian/Keterangan T4 :	Cetak Spanduk bahan Vinyl dan Fotocopy /Pengandaan [Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak]																									
	Uraian/Keterangan T4 :	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - ATK																									
	Uraian/Keterangan T4 :	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa]																									
	Uraian/Keterangan T4 :	Bendahara Pengeluaran [Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan]																									
	Uraian/Keterangan T4 :	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan]																									
	Uraian/Keterangan T4 :	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan]																									
	Uraian/Keterangan T4 :	Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan]																									
	Uraian/Keterangan T4 :	Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Anggaran [Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan]																									

LKjIP DP2PA Tahun 2024

Kode (Perangkat Daerah/ Ususan/ Bidang Ususan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Ususan/ Bidang Ususan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu -2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)			Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			-1	-1	-1	-1	-2	-2	-2	-3	-3	-3	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Faktor Pendukung T1:		ketersediaan data komitmen pimpinan																								
	Faktor Penghambat T1:		kegiatan dalam persiapan perencanaan																								
	Faktor Pendukung T2:		Tersedianya Anggaran																								
	Faktor Penghambat T2:		terfasanya kegiatan																								
	Faktor Pendukung T3:		tersedianya dukungan organisasi perangkat daerah, stakeholder																								
	Faktor Penghambat T3:		kegiatan berjalan dengan lancar																								
	Faktor Pendukung T4:		sesuai dengan anggaran dan kegiatan																								
	Faktor Penghambat T4:		terjadinya negosiasi di tw IV sehingga terjadi silva																								
Rata-rata capaian kinerja (%)																									100	89.65	
Predikat Kinerja																									ST	T	
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	2	2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	224,199,800	0	0	35,500,000	44,233,000	141,036,600	220,769,600	220,769,600	100	98.47											
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	2	2.03	Jumlah Layanan Lembaga Pemberdayaan Perempuan	2	Layanan	0	1	1	0	2	100														
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	2	2.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	125,000,000	PAD	0	PAD	0	PAD	379,330,000	865,500,000	124,483,000	124,483,000	100	99.59									
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	2	2.03	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	2	Lembaga	0	1	1	0	2	100														
	Uraian/Keterangan T1:		-																								
	Uraian/Keterangan T2:		Makanan dan Minuman Pembinaan Desa Prima dalam Peningkatan Manajemen Usaha Keluarga di Kecamatan Sambutan Bulan Juni																								
	Uraian/Keterangan T2:		Makanan dan Pengembangan Soft Skill UMM Perempuan di Kota Samarinda di PKK Kota																								
	Uraian/Keterangan T2:		Makanan dan Minuman Pembinaan Desa Prima dalam Peningkatan Manajemen Usaha Keluarga di Kecamatan Sungai Pinang Bulan Juni																								
	Uraian/Keterangan T3:		-																								
	Uraian/Keterangan T4:		Honorarium penanggung jawaban pengelola keuangan																								
	Uraian/Keterangan T4:		Honorarium pengadaan barang/jasa																								
	Uraian/Keterangan T4:		Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota																								
	Faktor Pendukung T1:		Ketersediaan data komitmen pimpinan																								
	Faktor Penghambat T1:		Kegiatan dalam persiapan pelaksanaan																								
	Faktor Pendukung T2:		Dukungan dari Kecamatan dan Kelurahan																								
	Faktor Penghambat T2:		Kegiatan berjalan dengan lancar																								
	Faktor Pendukung T3:		Tersedianya anggaran																								
	Faktor Penghambat T3:		Tersedianya anggaran																								
	Faktor Pendukung T4:		Tercapai berdasarkan rencana kerja TW 4																								
	Faktor Penghambat T4:		Anggaran silva karena terjadinya negosiasi di ecatalog																								

LkjIP DP2PA Tahun 2024

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu -2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)			Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.08.2.13.0.00.04.0000	2.8	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	99,199,800	PAD		0	PAD		35500000	PAD		6300000	PAD		54486600		96,286,600		96,286,600	100	97.06			
2.08.2.13.0.00.04.0000	2.8	2.03	2	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	20 Orang			0		1				15				4		20				100			
Uraian/Keterangan T1:								0																			
Uraian/Keterangan T2:				Paket Meeting Dalam Kota Seminar Peningkatan Peran Perempuan Rangka Hari Kartini				PAD			35.1																
Uraian/Keterangan T3:				Belanja alat/bahan kegiatan kantor-alat tulis kantor				PAD			6000000																
Uraian/Keterangan T3:				Belanja Cetak Spanduk kegiatan BIMTEK UMKM PEKA untuk strategi branding dan digital marketing				PAD			500000																
Uraian/Keterangan T3:				Belanja Paket Meeting kegiatan BIMTEK UMKM PEKA untuk strategi branding dan digital marketing				PAD			15750000																
Uraian/Keterangan T4:				Belanja alat/bahan kegiatan kantor-alat tulis kantor				PAD			2616800																
Uraian/Keterangan T4:				Belanja alat/bahan kegiatan kantor-bahan cetak				PAD			4319800																
Uraian/Keterangan T4:				Honorarium Narsum atau Pembahas, Moderator, Pembawa acara dan Panitia				PAD			7600000																
Uraian/Keterangan T4:				Honorarium Penanggung jawab pengelolaan keuangan				PAD			5020000																
Uraian/Keterangan T4:				Honorarium Pengadaan barang/jasa				PAD			680000																
Uraian/Keterangan T4:				Belanja makanan dan minuman rapat				PAD			3600000																
Uraian/Keterangan T4:				Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota				PAD			11700000																
Uraian/Keterangan T4:				Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota				PAD			1800000																
Uraian/Keterangan T4:				Honorarium Rohaniawan				PAD			1600000																
Faktor Pendukung T1:				ketersediaan data komitmen pimpinan																							
Faktor Penghambat T1:				kegiatan dalam persiapan perencanaan																							
Faktor Pendukung T2:				ketersediaan dana anggaran																							
Faktor Penghambat T2:				tercapainya kegiatan																							
Faktor Pendukung T3:				Adanya dukungan lembaga penyedia lembaga pemberdayaan perempuan																							
Faktor Penghambat T3:																											
Faktor Pendukung T4:				Tercapai berdasarkan rencana kerja TW 4																							
Faktor Penghambat T4:				anggaran silva karena terjadinya negosiasi di e-katalog																							
Rata-rata capaian kinerja (%)																							100		98.47		
Predikat Kinerja																							ST		ST		

LKjIP DP2PA Tahun 2024

Kode (Perangkat Daerah/Ususan/Bidang Ususan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Ususan/ Bidang Ususan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu -2023		Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)											
			K	Rp	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
			-1	-1	-1	-2	-2	-2	-3	-3	-3	-4	-4	-4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN (PROGRAM 2)																						100	94.07											
Predikat Kinerja																						ST	ST											
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			720,803,200			1,126,147,500			37,500,000			191,482,592			401,769,579			466,951,052			1,097,703,223			1,818,506,423	109.52	97.47				
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	3				0,036 Persen			0.014			0.008			0.008			0.006			0.036							100					
				Faktorisisi Program Triwulan 1:	Realisasi target biasanya mengacu pada rekapan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada akhir tahun atau pada triwulan 4																													
				Faktorisisi Program Triwulan 2:	Persentase kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO dihitung dari total kasus pada Triwulan 2 dibagi jumlah penduduk Perempuan (Dewasa) x 100																													
				Faktorisisi Program Triwulan 3:	Persentase kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO dihitung dari total kasus pada Triwulan 3 dibagi jumlah penduduk Perempuan (Dewasa) x 100																													
				Faktorisisi Program Triwulan 4:	Target indikator berdasarkan laporan yang diterima dan dilayani oleh UPTD PPA Kota Samarinda																													
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	3	2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			0		320,872,000			0			74,455,600			87,555,289			134,025,700			296,036,589			296,036,589	100	92.26				
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	3	2.01	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota			120 Kasus				36			19			19			16			90						75				
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	3	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			0		160,436,000	PAD	0	DAK Non Fisik		0	PAD		46924618	DAK Non Fisik		100420200			147,344,818			147,344,818	100	91.84				
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	3	2.01	1	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			1 Dokumen			0		0		0		0			1		1							100				
				Uraian/Keterangan T1:	Anggaran pada Sub Kegiatan ini							PAD				160436000																		
				Uraian/Keterangan T2:	Belum ada progres pembelanjaan kegiatan							DAK Non Fisik				0																		
				Uraian/Keterangan T3:	Belanja Honorarium narasumber kegiatan Workshop Persiapan Penyusunan Rencana Aksi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO							DAK Non Fisik				12000000																		
				Uraian/Keterangan T3:	Belanja Honorarium Rohaniawan							PAD				800000																		
				Uraian/Keterangan T3:	Belanja Cetak Spanduk							PAD				300000																		
				Uraian/Keterangan T3:	Belanja Perjalanan Dinas Ke KEMENPPA RI Jakarta. Belanja Perjalanan Dinas Narasumber Rakor dan Workshop Persiapan Penyusunan Rencana Aksi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan & TPPO							PAD				24949518																		
				Uraian/Keterangan T3:	Belanja Makan Minum Rapat (Rapat Koordinasi & Workshop Persiapan Penyusunan Rencana Aksi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan & TPPO)							DAK Non Fisik				13775000																		
				Uraian/Keterangan T4:	Belanja Makan Minum Kegiatan Sosialisasi di 5 (lima) Kelurahan							PAD				8625000																		
				Uraian/Keterangan T4:	Belanja Honorarium Narasumber Sosialisasi							PAD				27000000																		
				Uraian/Keterangan T4:	Belanja Jasa Iklan /reklame							DAK Non Fisik				40000000																		
				Uraian/Keterangan T4:	Belanja Perjalanan Dinas							PAD				5777200																		
				Uraian/Keterangan T4:	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota /Transport Peserta Kampanye							DAK Non Fisik				7650000																		
				Uraian/Keterangan T4:	Pembayaran Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan							PAD				6735000																		
				Uraian/Keterangan T4:	Pembayaran Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Jasa							PAD				2040000																		
				Uraian/Keterangan T4:	Pembelian belanja Alat Tulis Kantor							PAD				1936000																		
				Uraian/Keterangan T4:	Belanja makan minum kegiatan sosialisasi di Gedung PWI							PAD				1610000																		

LKjIP DP2PA Tahun 2024

Kode (Perangkat Daerah/ Usuan/ Bidang Usuan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Usuan/ Bidang Usuan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu -2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)																							
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																						
			-1	-1	-1	-1	-2	-2	-2	-3	-3	-3	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4																					
	Faktor Pendukung T1:	Adanya anggaran yang tersedia dalam sub kegiatan ini																																														
	Faktor Penghambat T1:	Tidak ada hambatan dikarenakan kegiatan baru akan dilaksanakan di Triwulan II																																														
	Faktor Pendukung T2:	Tidak ada																																														
	Faktor Penghambat T2:	DPA persegeran anggaran dari anggaran murni ke dana DAK belum terbit masih menunggu DPA keluar di bulan Juni																																														
	Faktor Pendukung T3:	Terpenuhinya Anggaran untuk melaksanakan kegiatan tsb																																														
	Faktor Penghambat T3:	Kurangnya tenaga SDM																																														
	Faktor Pendukung T4:	Anggaran yang terpenuhi																																														
	Faktor Penghambat T4:	Tidak ada hambatan																																														
2.08.2.13.0.00.04.0000	2.8.3	2.01.2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				0			160,436,000	PAD			0	PAD			744556000	PAD			40630671	PAD			33605500		148,691,771		148,691,771	100	92.68																
2.08.2.13.0.00.04.0000	2.8.3	2.01.2	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				2	Perangkat Daerah				0			1				1				0				2				100																	
	Uraian/Keterangan T1:	Anggaran yang akan dilaksanakan di Tahun 2024									PAD			160436000																																		
	Uraian/Keterangan T2:	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pelatihan advokasi pendampingan kader perempuan dalam pencegahan dan perlindungan korban kekerasan seksual.									PAD			38565000																																		
	Uraian/Keterangan T2:	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Study tiru Semarang-Jogja terkait KRPPA & Satgas Sigrak)									PAD			17440600																																		
	Uraian/Keterangan T2:	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pembayaran Uang harian peserta pelatihan)									PAD			18750000																																		
	Uraian/Keterangan T3:	Belanja Alat Tulis Kantor									PAD			6067100																																		
	Uraian/Keterangan T3:	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pelatihan advokasi pendampingan kader perempuan dalam pencegahan dan perlindungan korban kekerasan seksual.									PAD			21655000																																		
	Uraian/Keterangan T3:	Belanja Bahan Cetak (Spanduk , cetak foto copy)									PAD			1089500																																		
	Uraian/Keterangan T3:	Honorarium narasumber Pelatihan advokasi pendampingan kader perempuan dalam pencegahan dan perlindungan korban kekerasan seksual.									PAD			15300000																																		
	Uraian/Keterangan T3:	Belanja Perjalanan dinas Ke Balikpapan : 1. Pelatihan Simfoni PPA 2. Menghadiri Undangan FGD Pusat Informasi Perempuan Penyandang Disabilitas 3. Menghadiri Undangan Workshop Orientasi Standar Minimum Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dalam Situasi Bencana.									PAD			8638971																																		
	Uraian/Keterangan T4:	Pembayaran Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan									PAD			6412500																																		
	Uraian/Keterangan T4:	Pembayaran Honorarium Narasumber									PAD			900000																																		
	Uraian/Keterangan T4:	Belanja Jasa Iklan /Reklame / Roll Up Banner									PAD			6300000																																		
	Uraian/Keterangan T4:	Belanja Cetak Spanduk, leaflet kampanye									PAD			1600000																																		
	Uraian/Keterangan T4:	Belanja Cetak Buku laporan									PAD			298000																																		
	Faktor Pendukung T1:	Adanya anggaran yang disediakan																																														
	Faktor Penghambat T1:	Tidak ada hambatan dikarenakan kegiatan baru akan dilaksanakan di Triwulan II																																														
	Faktor Pendukung T2:	Tersedianya anggaran yang cukup untuk mendukung terlaksananya kegiatan tsb, tim kerja yang kompak dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, serta data pendukung dari Forum Perkas yang relatif membantu terlaksananya kegiatan.																																														
	Faktor Penghambat T2:	secara keseluruhan tidak ada hambatan,																																														
	Faktor Pendukung T3:	Terpenuhinya anggaran																																														
	Faktor Penghambat T3:	Kurangnya tenaga SDM																																														
	Faktor Pendukung T4:	Anggaran yang terpenuhi																																														
	Faktor Penghambat T4:	Tidak ada hambatan																																														
Rata-rata capaian kinerja (%)																																																
Predikat Kinerja																																																

LKjIP DP2PA Tahun 2024

Kode (Perangkat Daerah/ Ususan/ Bidang Ususan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Ususan/ Bidang Ususan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu -2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)						
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
2.08.2.13.0.00.04.0000	2.8.3.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		570,889,000		570,889,000		500,000,000			37,500,000			77,768,000			97,747,000			284,937,752			497,952,752			1,068,841,752	128.57	99.59			
2.08.2.13.0.00.04.0000	2.8.3.2.02	Jumlah kasus perempuan yang dirujuk dan menerima rujukan				70 Kasus					36			19			19			16			90				128.57				
2.08.2.13.0.00.04.0000	2.8.3.2.02.1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	45	570,889,000		570,889,000		500,000,000	PAD		37500000	PAD		77768000	PAD		97747000	PAD		284937752			497,952,752			1,068,841,752	128.57	99.59			
2.08.2.13.0.00.04.0000	2.8.3.2.02.1	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan				70 Orang					36			19			19			16			90				128.57				
		Uraian/Keterangan T1:	Belanja Jasa Tenaga Administrasi [Belanja Jasa Tenaga Administrasi]						PAD			37500000																			
		Uraian/Keterangan T2:	Belanja Alat Tulis Kantor						PAD			7548000																			
		Uraian/Keterangan T2:	Konsumsi Makan dan Minum Petugas dan Klien di Rumah Perlindungan						PAD			2016000																			
		Uraian/Keterangan T2:	Konsumsi Rapat Koordinasi						PAD			4320000																			
		Uraian/Keterangan T2:	Konsumsi Rapat Mediasi						PAD			3024000																			
		Uraian/Keterangan T2:	Konsumsi Tim Pendampingan dan Penjangkauan Korban						PAD			5040000																			
		Uraian/Keterangan T2:	Belanja Jasa Tenaga Administrasi UPTD PPA						PAD			25000000																			
		Uraian/Keterangan T2:	Kamera DSLR						PAD			9000000																			
		Uraian/Keterangan T2:	Smartphone untuk On Call Hotline UPTD PPA (Pengaduan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak)						PAD			3450000																			
		Uraian/Keterangan T3:	Belanja Jasa Tenaga Administrasi [Belanja Jasa Tenaga Administrasi]						PAD			50000000																			
		Uraian/Keterangan T3:	Konsumsi Makan dan Minum Petugas dan Klien di Rumah Perlindungan						PAD			2016000																			
		Uraian/Keterangan T3:	Konsumsi Rapat Koordinasi						PAD			4320000																			
		Uraian/Keterangan T3:	Konsumsi Rapat Mediasi						PAD			3024000																			
		Uraian/Keterangan T3:	Konsumsi Tim Pendampingan dan Penjangkauan Korban						PAD			5040000																			
		Uraian/Keterangan T3:	Belanja Baju Pengaman [Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman]						PAD			4000000																			
		Uraian/Keterangan T3:	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)						PAD			410000																			
		Uraian/Keterangan T3:	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan [Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan]						PAD			24225000																			
		Uraian/Keterangan T3:	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa]						PAD			8620500																			
		Uraian/Keterangan T3:	Belanja Natura dan Pakan-Pakan [Belanja Natura dan Pakan-Pakan]						PAD			13000000																			
		Uraian/Keterangan T4:	Belanja Jasa Tenaga Administrasi [Belanja Jasa Tenaga Administrasi]						PAD			37500000																			
		Uraian/Keterangan T4:	Belanja Perjalanan Dinas Biasa [Belanja Perjalanan Dinas Biasa]						PAD			68454852																			
		Uraian/Keterangan T4:	Belanja Makanan dan Minuman Rapat [Konsumsi Rapat Mediasi]						PAD			3024000																			
		Uraian/Keterangan T4:	Belanja Makanan dan Minuman Rapat [Konsumsi Rapat Koordinasi]						PAD			4320000																			
		Uraian/Keterangan T4:	Belanja Makanan dan Minuman Rapat [Konsumsi Tim Pendampingan dan Penjangkauan Korban]						PAD			1680000																			
		Uraian/Keterangan T4:	Belanja Makanan dan Minuman Rapat [Konsumsi Makan dan Minum Petugas dan Klien di Rumah Perlindungan]						PAD			6048000																			
		Faktor Pendukung T1:	Adanya tenaga administrasi (tenaga relawan pendampingan, mediasi dan penjangkauan) yang berkompeten dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang ada di UPTD PPA Kota Samarinda																												
		Faktor Penghambat T1:	Adanya keterbatasan pada kegiatan lain yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa, dikarenakan yang awalnya melalui pengadaan barang dan jasa langsung sekarang melalui metode e-purchasing																												
		Faktor Pendukung T2:	Adanya tenaga yang berpengalaman dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam melaksanakan Kegiatan Pendampingan, Mediasi dan Penjangkauan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan																												
		Faktor Penghambat T2:	Angka Kasus Kekerasan berdasarkan Laporan Sampai dengan Bulan Mei Tahun 2024, dikarenakan rekapan kasus biasa dilakukan diawal Bulan maka Laporan Kasus Perempuan dan Anak pada Bulan Juni belum direkap																												
		Faktor Pendukung T3:	Adanya tenaga administrasi (tenaga relawan pendampingan, mediasi dan penjangkauan) yang berkompeten dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang ada di UPTD PPA Kota Samarinda																												
		Faktor Penghambat T3:	Adanya keterbatasan kegiatan dikarenakan menunggu anggaran perubahan atau DPA dan RKA perubahan tahun 2024, khususnya pada kegiatan belanja perjalanan dinas yang awalnya ke Jakarta (Sinkronisasi Program dan Studi Tiru ke UPTD PPA Jakarta) menjadi ke Jogjakarta (Studi Tiru ke SIGRAK- Siap Gerak Atasi Kekerasan)																												
		Faktor Pendukung T4:	Adanya tenaga yang berpengalaman dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam melaksanakan Kegiatan Pendampingan, Mediasi dan Penjangkauan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan																												
		Faktor Penghambat T4:	Tidak ada hambatan namun pengerjaan sedikit terlambat dikarenakan adanya kekeliruan dalam pengadaan belanja jasa tenaga administrasi yang dimana pada SIPD-RI anggarannya berkurang, namun hal tersebut sudah dapat diatasi oleh bagian keuangan DP2PA Kota Samarinda																												

LKjIP DP2PA Tahun 2024

Kode (Perangkat Daerah/ Ususan/ Bidang Ususan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Ususan/ Bidang Ususan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPIMD Kota Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPIMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPIMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu -2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)			Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPIMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			-1	-1	-1	-1	-2	-2	-3	-3	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4
Rata-rata capaian kinerja (%)																							128.57	99.59			
Predikat Kinerja																							ST	ST			
2.08.2.13.0.00.04.0000	2.8.3.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		149,914,200		305,275,500		0		39,258,992		216,467,290		47,987,600		303,713,882		453,628,082	100	99.49							
2.08.2.13.0.00.04.0000	2.8.3.2.03	Jumlah laporan		1 Laporan		0		0		0		1		0		1			100								
2.08.2.13.0.00.04.0000	2.8.3.2.03.2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		0		160,436,000	PAD	0	PAD	37647992	PAD	99161390	PAD	22283000		159,092,382		159,092,382	100	99.16							
2.08.2.13.0.00.04.0000	2.8.3.2.03.2	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas		40 Orang		0		0		0		40		0		40			100								
Uraian/Keterangan T1 : Anggaran pada Sub Kegiatan ini																							PAD	160436000			
Uraian/Keterangan T2 : Anggaran pada Sub Kegiatan ini pada Triwulan II																							PAD	37647992			
Uraian/Keterangan T3 : Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor-ATK																							PAD	3734500			
Uraian/Keterangan T3 : Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak																							PAD	2084950			
Uraian/Keterangan T3 : Belanja Pakiaian Olahraga																							PAD	14775000			
Uraian/Keterangan T3 : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia																							PAD	10950000			
Uraian/Keterangan T3 : Belanja Perjalanan Dinas Biasa																							PAD	32668157			
Uraian/Keterangan T3 : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota																							PAD	9900000			
Uraian/Keterangan T3 : Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota																							PAD	60400000			
Uraian/Keterangan T4 : Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan																							PAD	5020000			
Uraian/Keterangan T4 : Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa																							PAD	680000			
Uraian/Keterangan T4 : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Buku Laporan)																							PAD	300000			
Uraian/Keterangan T4 : Belanja Makanan dan Minuman Rapat																							PAD	7755000			
Uraian/Keterangan T4 : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia																							PAD	2746875			
Uraian/Keterangan T4 : Belanja Perjalanan Dinas Biasa																							PAD	6803000			
Uraian/Keterangan T4 : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota																							PAD	1275000			
Faktor Pendukung T1 : Anggaran yang tersedia																											
Faktor Penghambat T1 : Sejauh ini belum ada hambatan dikarenakan kegiatan baru akan dilaksanakan di Triwulan II																											
Faktor Pendukung T2 : Adanya anggaran yang tersedia																											
Faktor Penghambat T2 : Target indikator kinerja sub kegiatan belum tercapai namun kegiatan didalam sub kegiatan ini sudah berjalan																											
Faktor Pendukung T3 : Tersedianya Anggaran - Tersedianya SDM																											
Faktor Penghambat T3 : Di karenakan adanya pergeseran menyebabkan kegiatan terlaksana di triwulan 3																											
Faktor Pendukung T4 : Tersedianya anggaran dan SDM sehingga kegiatan terselesaikan dengan baik sesuai target.																											
Faktor Penghambat T4 : Tidak Ada																											

LKjIP DP2PA Tahun 2024

Kode (Perangkat Daerah/ Usayah/ Bidang Usayah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Usayah/ Bidang Usayah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampul Dengan RKPD Kota Tahun Lalu -2023		Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)																																					
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp																																				
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	3	2.03	Penyediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus kewenangan Kabupaten/Kota	700	149.914.200			122.239.500	PAD			0	PAD			1611000	PAD			114416500	PAD			6000000	122.027.500			271.941.700	100	99.83																												
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	3	2.03	Jumlah Perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik			110	Orang			0				10					100			110						100																														
					Uraian/Keterangan T1:	Anggaran seluruhnya pada Sub Kegiatan ini				PAD																																																		
					Uraian/Keterangan T2:	Anggaran pada Triwulan II				PAD																																																		
					Uraian/Keterangan T3:	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-ATK				PAD																																																		
					Uraian/Keterangan T3:	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak				PAD																																																		
					Uraian/Keterangan T3:	Belanja barang untuk dijual/di serahkan kepada masyarakat				PAD																																																		
					Uraian/Keterangan T4:	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan				PAD																																																		
					Uraian/Keterangan T4:	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				PAD																																																		
					Uraian/Keterangan T4:	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Buku Laporan)				PAD																																																		
					Faktor Pendukung T1:	Anggaran yang ada																																																						
					Faktor Penghambat T1:	Kegiatan akan dilaksanakan pada Triwulan II																																																						
					Faktor Pendukung T2:	Anggaran yang tersedia																																																						
					Faktor Penghambat T2:	Tidak ada hambatan																																																						
					Faktor Pendukung T3:	Tersedianya anggaran - tersedianya SDM																																																						
					Faktor Penghambat T3:	Kegiatan baru terlaksana karena adanya pergeseran																																																						
					Faktor Pendukung T4:	Tersedianya anggaran dan SDM sehingga kegiatan terselesaikan dengan baik sesuai target.																																																						
					Faktor Penghambat T4:	Tidak Ada																																																						
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	3	2.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota - UPD Perindungan Perempuan dan Anak			22.600.000	PAD					0	PAD												2880400	PAD			19704000		22.594.000			22.594.000	100	99.97																						
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	3	2.03	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota							0				0					2													100																										
					Uraian/Keterangan T1:	Kegiatan belum terlaksana dikarenakan kegiatan direncanakan baru akan dijalankan pada Triwulan 2 dan Triwulan 3				PAD																																																		
					Uraian/Keterangan T2:	Kegiatan belum terlaksana dikarenakan kegiatan direncanakan baru akan dijalankan pada Triwulan 3 dan Triwulan 4				PAD																																																		
					Uraian/Keterangan T3:	Belanja Jasa Tenaga Ahli Instalasi Listrik (Belanja Jasa Tenaga Ahli)				PAD																																																		
					Uraian/Keterangan T3:	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih)				PAD																																																		
					Uraian/Keterangan T3:	Anggaran yang di Rasionalisasi pada Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				PAD																																																		
					Uraian/Keterangan T4:	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi (Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi)				PAD																																																		
					Uraian/Keterangan T4:	Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan (Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan)				PAD																																																		
					Uraian/Keterangan T4:	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik)				PAD																																																		
					Uraian/Keterangan T4:	Belanja Jasa Tenaga Ahli Tukang (Belanja Jasa Tenaga Ahli)				PAD																																																		
					Faktor Pendukung T1:	Adanya anggaran untuk melaksanakan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Triwulan 2																																																						
					Faktor Penghambat T1:	Adanya keterbatasan dikemukakan pemilihan penyedia melalui e-purchasing yang menyediakan kegiatan sarana dan prasarana																																																						
					Faktor Pendukung T2:	Anggaran sudah tersedia																																																						
					Faktor Penghambat T2:	Pemilihan penyedia didalam Aplikasi E-Catalogue																																																						
					Faktor Pendukung T3:	Anggaran sudah tersedia																																																						
					Faktor Penghambat T3:	Adanya rasionalisasi Anggaran sebesar Rp 27.400.000 pada sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota. Kegiatan akan dilaksanakan di Triwulan IV setelah anggaran perubahan sudah keluar (DPA dan RKA)																																																						
					Faktor Pendukung T4:	Adanya anggaran yang tersedia dalam program dan sub kegiatan yang dijalankan																																																						
					Faktor Penghambat T4:	Pemilihan penyedia dalam e-catalogue dalam pelaksanaan kegiatan																																																						
Rata-rata capaian kinerja (%)																																																												
Predikat Kinerja																																																												
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN (PROGRAM 3)																																																												
Predikat Kinerja																																																												
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	4		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			129.968.330																																																				
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	4		persentase perkawinan anak																																																							
					Faktorasi Program Triwulan 1:	tersedianya SDM dan anggaran																																																						
					Faktorasi Program Triwulan 2:	tersedianya SDM dan Anggaran																																																						
					Faktorasi Program Triwulan 3:	tercapai																																																						
					Faktorasi Program Triwulan 4:	tersedianya SDM dan anggaran																																																						
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	4	2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			129.968.330																																																				
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	4	2.02	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang terstandarisasi							1				5																																												
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	4	2.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			99.968.330																																																				
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	4	2.02	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan							1				5																																												

LKjIP DP2PA Tahun 2024

Kode (Perangkat Daerah/Ususan/Bidang Ususan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Ususan/ Bidang Ususan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun Berjalan yg dievaluasi (2024)			Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)																																	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																																	
	Usaian/Keterangan T1:	Belanja Perjalanan Dinas dalam Rangka Rakerda Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak seKalimantan Timur di Kabupaten Paser Utara						PAD																																																			
	Usaian/Keterangan T1:	Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Rangka Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Sekolah						PAD																																																			
	Usaian/Keterangan T1:	Belanja Alat Tulis Kantor pada sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						PAD																																																			
	Usaian/Keterangan T2:	Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak						PAD																																																			
	Usaian/Keterangan T2:	Belanja Makanan dan Minuman Rapat kegiatan Peningkatan Kualitas keluarga dalam rangka pencegahan perkawinan usia anak						PAD																																																			
	Usaian/Keterangan T2:	Belanja jasa Narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panita						PAD																																																			
	Usaian/Keterangan T3:	Belanja jasa Narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panita						PAD																																																			
	Usaian/Keterangan T3:	Belanja Alat Tulis Kantor pada sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						PAD																																																			
	Usaian/Keterangan T4:	Belanja jasa Narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panita						PAD																																																			
	Usaian/Keterangan T4:	Belanja Perjalanan Dinas dalam Rangka Kegiatan Bimtek Penyusunan Renstra DP2PA						PAD																																																			
	Usaian/Keterangan T4:	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan						PAD																																																			
	Usaian/Keterangan T4:	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa						PAD																																																			
	Usaian/Keterangan T4:	Belanja Cetak Buku Laporan						PAD																																																			
	Faktor Pendukung T1:	Dukungan pimpinan, rekan kerja dan Anggaran																																																									
	Faktor Penghambat T1:	tidak ada																																																									
	Faktor Pendukung T2:	tersedianya SOM dan Anggaran																																																									
	Faktor Penghambat T2:	tidak ada																																																									
	Faktor Pendukung T3:	adanya dukungan pimpinan dan ketersediaan dana																																																									
	Faktor Penghambat T3:	tidak ada faktor penghambat																																																									
	Faktor Pendukung T4:	Tidak ada																																																									
	Faktor Penghambat T4:	tidak ada																																																									
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	4	2.02	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	30.000.000	121.514.000	PAD			0	PAD			25632000	PAD			78828987	PAD			13367500		117.828.487		147.828.487	100	96.97																												
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	4	2.02	2	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		50 Orang					0				20								30		0		50		100																												
	Usaian/Keterangan T1:	Penyusunan Rencana Kerja Rapat Koordinasi																																																									
	Usaian/Keterangan T2:	Belanja Alat Tulis Kantor																																																									
	Usaian/Keterangan T2:	Belanja Cetak - Leaflet																																																									
	Usaian/Keterangan T2:	Belanja Modal Komputer																																																									
	Usaian/Keterangan T3:	Perjalanan Dinas ke Yogyakarta, Mengikuti Capacity Building Petugas Layanan Puspaga (Belanja Perjalanan Dinas Biasa)																																																									
	Usaian/Keterangan T3:	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan																																																									
	Usaian/Keterangan T4:	Belanja Alat Tulis Kantor																																																									
	Usaian/Keterangan T4:	Perjalanan Dinas ke Jakarta dalam Rangka Kegiatan Bimtek Penyusunan Renstra DP2PA																																																									
	Usaian/Keterangan T4:	Pembayaran Honorarium Pengelolaan Keuangan																																																									
	Usaian/Keterangan T4:	Pembayaran Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa																																																									
	Usaian/Keterangan T4:	Belanja Cetak Laporan																																																									
	Faktor Pendukung T1:	Dukungan Pimpinan, Rekan Kerja																																																									
	Faktor Penghambat T1:	tidak ada																																																									
	Faktor Pendukung T2:	tersedianya anggaran																																																									
	Faktor Penghambat T2:	tidak ada faktor penghambat																																																									
	Faktor Pendukung T3:	tersedianya dana untuk kegiatan																																																									
	Faktor Penghambat T3:	tidak ada																																																									
	Faktor Pendukung T4:	tersedianya anggaran																																																									
	Faktor Penghambat T4:	tidak ada																																																									
Rata-rata capaian kinerja (%)																																																									100	97,35	
Predikat Kinerja																																																										ST	ST
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	4	2.03	1	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		0	270.000.000				3.785.000				77.698.000									67.119.250		120.886.350		269.488.600		269.488.600	75	99,81																									
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	4	2.03	1	Jumlah layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak		250 Keluarga					77				2								171		0		250				100																										
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	4	2.03	1	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		0	270.000.000	PAD			3785000	PAD			77698000	PAD							67119250	PAD		120886350		269.488.600		269.488.600	75	99,81																									
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	4	2.03	1	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia		4 Layanan					1				2								0		0		4			75																											

LKjIP DP2PA Tahun 2024

Kode (Perangkat Daerah/ Ususan/ Bidang Ususan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Ususan/ Bidang Ususan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu -2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Uraian/Keterangan T1:	1. Menyusun rencana kerja 2. Melakukan sosialisasi Layanan melalui penyebaran brosur 3. Membuka layanan di puspa							PAD																	
	Uraian/Keterangan T2:	Belanja Tenaga Ahli							PAD																	
	Uraian/Keterangan T2:	Belanja Alat Tulis Kantor							PAD																	
	Uraian/Keterangan T2:	Belanja makan dan minuman rapat							PAD																	
	Uraian/Keterangan T2:	Belanja Cetak Leaflet							PAD																	
	Uraian/Keterangan T3:	Belanja makan dan minum rapat							PAD																	
	Uraian/Keterangan T3:	Belanja Tenaga Ahli							PAD																	
	Uraian/Keterangan T3:	Belanja Peralatan dan Mesin - Alat Kantor dan rumah tangga (Pembuatan Piang Puspaga)							PAD																	
	Uraian/Keterangan T3:	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat/Bahan Kebersihan							PAD																	
	Uraian/Keterangan T3:	Belanja Alat Tulis Kantor							PAD																	
	Uraian/Keterangan T3:	Belanja Jasa Iklan/Reklame, film dan pemotretan							PAD																	
	Uraian/Keterangan T3:	Belanja Cetak Leaflet							PAD																	
	Uraian/Keterangan T4:	Belanja Perjalanan Dinas Mengikuti Kordinasi Layanan Peningkatan Kualitas Layanan PUSPAGA di Berau							PAD																	
	Uraian/Keterangan T4:	Belanja Perjalanan Dinas Ke DP3A Provinsi dalam Rangka Studi Tiru Pelayanan PUSPAGA dan UPTD PPA							PAD																	
	Uraian/Keterangan T4:	Belanja Perjalanan Dinas Ke Jakarta dalam Rangka Kegiatan Bimtek Penyusunan Renstra DP2PA							PAD																	
	Uraian/Keterangan T4:	Belanja Jasa Tenaga Ahli di Puspaga							PAD																	
	Uraian/Keterangan T4:	Belanja Honorarium Pengelolaan Keuangan							PAD																	
	Uraian/Keterangan T4:	Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan barang/Jasa							PAD																	
	Uraian/Keterangan T4:	Belanja jasa iklan/reklame, film dan pemotretan (Pembuatan Iklan Layanan Masyarakat)							PAD																	
	Uraian/Keterangan T4:	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat/Bahan Kebersihan							PAD																	
	Uraian/Keterangan T4:	Belanja Modal Lemaria Besi/Rak berkas besi							PAD																	
	Uraian/Keterangan T4:	Belanja Alat Tulis Kantor							PAD																	
	Uraian/Keterangan T4:	Belanja Cetak Buku Laporan							PAD																	
	Faktor Pendukung T1:	Dukungan Pimpinan dan Rekan Kerja																								
	Faktor Penghambat T1:	tidak ada																								
	Faktor Pendukung T2:	tersedianya anggaran																								
	Faktor Penghambat T2:	tidak ada																								
	Faktor Pendukung T3:	Tersedianya dukungan Pimpinan dan anggaran																								
	Faktor Penghambat T3:	tidak ada																								
	Faktor Pendukung T4:	tersedianya Anggaran																								
	Faktor Penghambat T4:	Tidak Ada																								
Rata-rata capaian kinerja (%)																							75	99,81		
Predikat kinerja																							5	ST		

LKjIP DP2PA Tahun 2024

Kode (Perangkat Daerah/ Usuan/ Bidang Usuan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Usuan/ Bidang Usuan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu -2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)			Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			-1	-1	-1	-1	-2	-2	-2	-3	-3	-3	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN (PROGRAM 4)																								87,5	98,61		
Predikat Kinerja																								T	ST		
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	4	5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		118,950,000	220,000,000	11,478,000	57,185,000	48,931,500	98,960,300	216,554,800	335,504,800	100	98,43												
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	4	5	Jumlah Dokumen Data Pihak Gender dan Anak		4 Dokumen		1	1	1	1	4		100													
				Faktorisi Program Triwulan 1:		tercapai di triwulan 2																					
				Faktorisi Program Triwulan 2:		tercapai di triwulan 3																					
				Faktorisi Program Triwulan 3:		tercapai																					
				Faktorisi Program Triwulan 4:		tercapai berdasarkan rencana kerja TW 4																					
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	4	5	2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	118,950,000	220,000,000	11,478,000	57,185,000	48,931,500	98,960,300	216,554,800	335,504,800	100	98,43												
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	4	5	2.01	Jumlah dokumen data gender dan anak kabupaten/kota yang tersedia	4 Dokumen		1	1	1	1	4		100													
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	4	5	2.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	4	118,950,000	220,000,000	PAD	11478000	PAD	57185000	PAD	48931500	PAD	98960300	216,554,800	335,504,800	100	98,43							
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	4	5	2.01	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 Dokumen		1	1	1	1	4		100													
					Uraian/Keterangan T1:	belanja perjalanan dinas biasa			PAD	11478000																	
					Uraian/Keterangan T2:	Belanja Modal Personal Computer- Komputer PC All In One			PAD	29000000																	
					Uraian/Keterangan T2:	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya- Scanner Kecil			PAD	13600000																	
					Uraian/Keterangan T2:	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya- Uninterruptible Power Supply (Ups) dan Flahdisk 64GB			PAD	34400000																	
					Uraian/Keterangan T2:	Perjalanan Dinas Mengikuti Rapat Kerja SIGA Tahun 2024			PAD	36900000																	
					Uraian/Keterangan T2:	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi (FGD) Pengumpulan dan Pengolahan Profil Data Gender dan Anak			PAD	63900000																	
					Uraian/Keterangan T2:	Kegiatan Serah Terima Buku Profil Gender dan Anak Tahun 2024			PAD	10650000																	
					Uraian/Keterangan T3:	Perjalanan Dinas ke Jakarta melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pasca evaluasi mandiri dan rencana Verifikasi Lapangan ke Kemen PPPA			PAD	15719000																	
					Uraian/Keterangan T3:	Perjalanan Dinas mengikuti Pelatihan SIMFONI PPA			PAD	2726000																	
					Uraian/Keterangan T3:	Alat Tulis Kantor			PAD	7566500																	
					Uraian/Keterangan T3:	Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			PAD	10420000																	
					Uraian/Keterangan T3:	Honorarium Admin dan Operator SIMFONI PPA			PAD	12500000																	
					Uraian/Keterangan T4:	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi (FGD) Penyempulan dan Penyajian Buku Profil Data Gender dan Anak Kota Samarinda Tahun 2024			PAD	63000000																	
					Uraian/Keterangan T4:	Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah			PAD	52000000																	
					Uraian/Keterangan T4:	Belanja Honorarium Narasumber, Moderator, Pembawa Acara Kegiatan Pengumpulan, dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah			PAD	42000000																	
					Uraian/Keterangan T4:	Perjalanan Dinas Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan ke kementerian Perlindungan perempuan dan anak di jakarta an Emi Agus Wulan Anani berserta 2 orang Pengikut			PAD	7858000																	
					Uraian/Keterangan T4:	Perjalanan Dinas Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan ke kementerian desa dan kementerian Perlindungan perempuan dan anak di jakarta an Ahmad Irwansyah			PAD	3962000																	
					Uraian/Keterangan T4:	Tiket melalui KOPD Perjalanan Dinas Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan ke kementerian Perlindungan perempuan dan anak di jakarta an Emi Agus Wulan Ariani berserta 6 orang Pengikut			PAD	16362000																	
					Uraian/Keterangan T4:	Belanja Penyusunan dan Analisis Buku Profil Gender dan Anak Kota Samarinda tahun 2024			PAD	32029500																	
					Uraian/Keterangan T4:	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Honorarium Admin dan Operator Penginput Data Kerasan Aplikasi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA)			PAD	15000000																	
					Uraian/Keterangan T4:	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			PAD	5909400																	
					Uraian/Keterangan T4:	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Fotocopy)			PAD	1289400																	
					Uraian/Keterangan T4:	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa			PAD	850000																	
					Faktor Pendukung T1:	ketersediaan anggaran sehingga terlaksananya kegiatan perjalanan dinas guna mendukung tersedianya data gender dan anak																					
					Faktor Penghambat T1:	kurangnya pemahaman tentang aplikasi																					
					Faktor Pendukung T2:	Adanya kerjasama dengan pihak ke tiga dalam penyusunan buku Profil Data Gender dan Anak																					
					Faktor Penghambat T2:	Belum terkumpulnya data di Perangkat Daerah terkait																					
					Faktor Pendukung T3:	Ketersediaan Anggaran Sub Kegiatan Penediaan Data Gender dan Anak																					
					Faktor Penghambat T3:	Kurang aktifnya perangkat daerah dalam mengumpulkan data																					
					Faktor Pendukung T4:	seluruh tim saling bekerja sama dalam pencapaian target sub kegiatan																					
					Faktor Penghambat T4:	untuk tw 4 tidak ada faktor penghambat sub kegiatan																					

LKjIP DP2PA Tahun 2024

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu -2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun bejalan yg dievaluasi (2024)			Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			-1	-1	-1	-1	-2	-2	-2	-3	-3	-3	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4
Rata-rata capaian kinerja (%)																								100	98.43		
Predikat Kinerja																								ST	ST		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN (PROGRAM 5)																								100	98.43		
Predikat Kinerja																								ST	ST		
2.08.2.13.0.00.04.00000	2.8.6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			779,549,163		1,000,480,000		77,789,880		154,767,900		318,210,000		407,065,150		957,832,930		1,737,382,093	100	95.74						
2.08.2.13.0.00.04.00000	2.8.6	Kota Layak Anak			800 s/d 900 Peringkat			0	0	0	846.37		0	846.37						0.11							
		Faktorasi Program Triwulan 1:	Evaluasi Kota Layak Anak Belum dilaksanakan oleh Kementerian PPPA																								
		Faktorasi Program Triwulan 2:	Akan terfaksana di TW 3 dan 4																								
		Faktorasi Program Triwulan 3:	Tercapai dalam evaluasi kabupaten/kota layak anak 2024																								
		Faktorasi Program Triwulan 4:	Anggaran Tersedia																								
2.08.2.13.0.00.04.00000	2.8.6	2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		521,579,068		500,480,000		33,067,080		65,292,000		81,640,000		312,867,020		492,866,900		1,014,445,968	100	98.48						
2.08.2.13.0.00.04.00000	2.8.6	2.01	Dokumen KLA		7 Dokumen			0	0		0		7	7						100							
2.08.2.13.0.00.04.00000	2.8.6	2.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	30	135,076,686		98,000,000 PAD		600000 PAD		1419000 PAD		6095000 PAD		86044120		94,158,120		229,234,806	100	96.08						
2.08.2.13.0.00.04.00000	2.8.6	2.01	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha		30 Organisasi			0	0		1		29	30						100							
		Uraian/Keterangan T1:					0 PAD		120000000																		
		Uraian/Keterangan T2:	Kegiatan dilaksanakan pada TW 2 berupa Belanja ATK				PAD		0																		
		Uraian/Keterangan T2:	Kegiatan Selanjutnya masih dalam proses pengerjaan				PAD		0																		
		Uraian/Keterangan T3:	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (2x Belanja Penggandaan Photocopy)				PAD		2																		
		Uraian/Keterangan T4:	Belanja Makan Minum Rapat Kegiatan Advokasi Kebijakan KLA				PAD		480000																		
		Uraian/Keterangan T4:	Belanja Paket Meeting Hotel Kegiatan Advokasi Kebijakan KLA				PAD		19040000																		
		Uraian/Keterangan T4:	Belanja Cetak Spanduk				PAD		1800000																		
		Uraian/Keterangan T4:	Belanja Alat Tulis Kantor				PAD		3101500																		
		Uraian/Keterangan T4:	Belanja Modal dan Mesin Pembuatan Plang Ramah Anak				PAD		22500000																		
		Uraian/Keterangan T4:	Belanja Cetak Poster A2				PAD		7400000																		
		Uraian/Keterangan T4:	Belanja Cetak Spanduk / Backdrop				PAD		3600000																		
		Uraian/Keterangan T4:	Belanja Honorarium Narsum, Moderator, Pembaca Acara				PAD		5100000																		
		Uraian/Keterangan T4:	Belanja Honorarium Rohaniawan				PAD		400000																		
		Uraian/Keterangan T4:	Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa				PAD		1360000																		
		Uraian/Keterangan T4:	Belanja Perjalanan Dinas				PAD		20516000																		
		Uraian/Keterangan T4:	Belanja Penggandaan Photocopy A4/F4				PAD		1055700																		
		Uraian/Keterangan T4:	Belanja Penggandaan Photocopy A4/F4				PAD		450000																		
		Uraian/Keterangan T4:	Belanja Penggandaan Photocopy A4/F4				PAD		600000																		
		Uraian/Keterangan T4:	Belanja Alat Tulis Kantor				PAD		1419000																		
		Uraian/Keterangan T4:	Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan				PAD		5645000																		
		Faktor Pendukung T1:																						0			
		Faktor Penghambat T1:																						0			
		Faktor Pendukung T2:	Tersedianya Anggaran Kegiatan																								
		Faktor Penghambat T2:	Perlu Waktu Mempelajari setiap bagian kegiatan yang ada di E-katalog																								
		Faktor Pendukung T3:	Anggaran Tersedia																								
		Faktor Penghambat T3:	Tidak ada faktor penghambat																								
		Faktor Pendukung T4:	Anggaran Tersedia																								
		Faktor Penghambat T4:	Tidak Ada																								

LKjIP DP2PA Tahun 2024

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu -2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)			Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			-1	-1	-1	-1	-2	-2	-2	-3	-3	-3	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4		
Rata-rata capaian kinerja (%)																												100	98.48	
Predikat Kinerja																												ST	ST	
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	4	6	2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak kewenangan Kabupaten/kota		257,970,055		500,000,000		44,722,800		89,475,900		236,570,000		94,197,330		464,966,030		722,936,125	100	92.99							
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	4	6	2.02	Jumlah Lembaga Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak		15 Lembaga			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	4	6	2.02	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak kewenangan Kabupaten/kota		130	49,098,060	200,000,000	PAD	0	PAD	449,290,000	PAD	109,906,900	PAD	309,046,300	PAD	185,340,130	PAD	234,438,190	100	92.67							
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	4	6	2.02	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak kewenangan Kabupaten/kota		125 Orang			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Urutan/Keterangan T1:	0 PAD																											200000000		
Urutan/Keterangan T2:	PAD																											9755000		
Urutan/Keterangan T2:	PAD																											2824000		
Urutan/Keterangan T2:	PAD																											17750000		
Urutan/Keterangan T2:	PAD																											600000		
Urutan/Keterangan T3:	PAD																											41840000		
Urutan/Keterangan T3:	PAD																											27950000		
Urutan/Keterangan T3:	PAD																											400000		
Urutan/Keterangan T3:	PAD																											1220000		
Urutan/Keterangan T3:	PAD																											38096500		
Urutan/Keterangan T4:	PAD																											15210000		
Urutan/Keterangan T4:	PAD																											300000		
Urutan/Keterangan T4:	PAD																											210000		
Urutan/Keterangan T4:	PAD																											3425000		
Urutan/Keterangan T4:	PAD																											1648850		
Faktor Pendukung T1:																														
Faktor Penghambat T1:																														
Faktor Pendukung T2:	Kegiatan dilaksanakan dengan e-purchasing																													
Faktor Penghambat T2:	Tidak ada hambatan																													
Faktor Pendukung T3:	Kegiatan dilaksanakan dengan e-purchasing																													
Faktor Penghambat T3:	Tidak ada hambatan																													
Faktor Pendukung T4:	Kegiatan dilaksanakan dengan e-purchasing																													
Faktor Penghambat T4:	Tidak ada hambatan																													
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	4	6	2.02	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/kota		3	59,968,435	150,000,000	PAD	0	17880000	PAD	33181400	PAD	60433500	PAD	26370800	PAD	137,885,700	100	91.92								
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	4	6	2.02	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak kewenangan Kabupaten/kota		3 Dokumen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Urutan/Keterangan T1:	Kegiatan baru akan dilaksanakan di Triwulan II																													
Urutan/Keterangan T2:	Belanja Alat/Bahan Utk. Keg. Kantor - Alat Tulis Kantor																													
Urutan/Keterangan T2:	PAD																											1774000		
Urutan/Keterangan T2:	Belanja Alat/Bahan Utk. Keg. Kantor - Bahan Cetak																													
Urutan/Keterangan T2:	PAD																											5764400		
Urutan/Keterangan T2:	Belanja Makanan dan Minuman Rapat																													
Urutan/Keterangan T2:	PAD																											9050000		
Urutan/Keterangan T2:	Honorarium Narasumber atau Pembahasan, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia																													
Urutan/Keterangan T2:	PAD																											6400000		
Urutan/Keterangan T2:	Honorarium Rohaniawan																													
Urutan/Keterangan T2:	PAD																											400000		
Urutan/Keterangan T2:	Belanja Perjalanan Dinas Biasa																													
Urutan/Keterangan T2:	PAD																											14870800		
Urutan/Keterangan T2:	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota																													
Urutan/Keterangan T2:	PAD																											15750000		
Urutan/Keterangan T3:	Belanja Alat/Bahan Utk. Keg. Kantor-Bahan Cetak																													
Urutan/Keterangan T3:	PAD																											600000		
Urutan/Keterangan T3:	Belanja Makanan dan Minuman Rapat																													
Urutan/Keterangan T3:	PAD																											24830000		
Urutan/Keterangan T3:	Honorarium Rohaniawan																													
Urutan/Keterangan T3:	PAD																											1200000		
Urutan/Keterangan T3:	Honorarium Narasumber atau Pembahasan, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia																													
Urutan/Keterangan T3:	PAD																											6050000		
Urutan/Keterangan T3:	Belanja Perjalanan Dinas Biasa																													
Urutan/Keterangan T3:	PAD																											13605500		
Urutan/Keterangan T4:	Belanja makan minum rapat																													
Urutan/Keterangan T4:	PAD																											13860000		
Urutan/Keterangan T4:	Belanja Alat/Bahan Utk. Keg. Kantor-Bahan Cetak																													
Urutan/Keterangan T4:	PAD																											1800000		
Urutan/Keterangan T4:	Honorarium Narasumber atau Pembahasan, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia																													
Urutan/Keterangan T4:	PAD																											8750000		
Urutan/Keterangan T4:	Belanja Perjalanan Dinas Biasa																													
Urutan/Keterangan T4:	PAD																											1280000		
Urutan/Keterangan T4:	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa																													
Urutan/Keterangan T4:	PAD																											680000		
Faktor Pendukung T1:	Anggaran tersedia namun belum ada kegiatan yang dijalankan																													
Faktor Penghambat T1:	Kegiatan baru akan dilaksanakan di Triwulan II																													
Faktor Pendukung T2:	Administrasi Kegiatan Menggunakan E-Purchasing																													
Faktor Penghambat T2:	Perencanaan yang dibuat tidak sesuai dengan timeline kegiatan																													
Faktor Pendukung T3:	Tersedianya Anggaran																													
Faktor Penghambat T3:	Tidak Ada Hambatan																													
Faktor Pendukung T4:	Tersedianya Anggaran																													
Faktor Penghambat T4:	Tidak ada																													

LKjIP DP2PA Tahun 2024

Kode (Perangkat Daerah/ Usuan/ Bidang Usuan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Usuan/ Bidang Usuan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu -2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)			Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			-1	-1	-1	-2	-2	-2	-3	-3	-3	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4
2.08.2.13.0.00.04.0000	2.6.7.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		0		187,195,000			0				6,960,825			136,168,001			39,327,511			182,456,337			182,456,337	100	97.47
2.08.2.13.0.00.04.0000	2.6.7.2.03	Jumlah Lembaga Layanan Anak yang Mendapatkan Pelatihan		2 Lembaga					0			1			0			1		2						100	
2.08.2.13.0.00.04.0000	2.6.7.2.03.6	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/		0		187,195,000	PAD		0	PAD			6,960,825	PAD				136,168,001	PAD			39,327,511			182,456,337	100	97.47
2.08.2.13.0.00.04.0000	2.6.7.2.03.6	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang telah dan mendapatkan sertifikat perlindungan dan Penanganan AMPK		10 Orang					0			10			0			0		10						100	
		Uraian/Keterangan T1:	Kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan ke 2																								
		Uraian/Keterangan T2:	Belanja Alat Tulis Kantor dan Seminar Kit Bimtek Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak (LPKRA)																								
		Uraian/Keterangan T2:	Belanja Cetak Backdrop dan Sertifikat Bimtek Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak																								
		Uraian/Keterangan T2:	Belanja Honorarium Narasumber, Moderator, Pembawa Acara, panitia kegiatan Bimtek Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak (LPKRA)																								
		Uraian/Keterangan T2:	Belanja Paket Meeting Dalam Kota Bimtek Lembaga Perlindungan Khusus ramah anak (LPKRA)																								
		Uraian/Keterangan T3:	Belanja Cetak Sertifikat Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus																								
		Uraian/Keterangan T3:	Belanja Honorarium Narasumber Pelatihan Manajemen dan Penanganan kasus In House training DAK Non Fisik 2024																								
		Uraian/Keterangan T3:	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelatihan Manajemen dan Penanganan kasus In House training DAK Non Fisik 2024																								
		Uraian/Keterangan T3:	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Pelatihan Manajemen dan Penanganan kasus In House training DAK Non Fisik 2024																								
		Uraian/Keterangan T3:	Belanja Perjalanan Dinas Biasa																								
		Uraian/Keterangan T3:	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan																								
		Uraian/Keterangan T3:	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa																								
		Uraian/Keterangan T4:	Terlaksananya Kegiatan Belanja Alat Tulis Kantor- Seminar Kit Kegiatan Pelatihan Fasilitator Perlindungan Anak																								
		Uraian/Keterangan T4:	Terlaksananya Kegiatan Belanja Cetak Untuk Kegiatan Kantor - Cetak Laporan, Fotokopi Kegiatan, Cetak Buku Saku																								
		Uraian/Keterangan T4:	Terlaksananya Kegiatan Belanja Cetak Untuk Kegiatan Kantor - Cetak Laporan, Fotokopi Kegiatan DAK Non Fisik																								
		Uraian/Keterangan T4:	Terlaksananya Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Kegiatan Pelatihan Fasilitator Perlindungan Anak																								
		Uraian/Keterangan T4:	Terlaksananya Kegiatan Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - Kegiatan Pelatihan Fasilitator Perlindungan Anak																								
		Uraian/Keterangan T4:	Terlaksananya Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Rapat Koordinasi Kabupaten/Kota Layak, Perjadin narasumber Luar Daerah Kegiatan Pelatihan Fasilitator perlindungan anak dan Kegiatan Koordinasi dan Kunjungan lapangan Ke DKP3A Kota Balikpapan																								
		Uraian/Keterangan T4:	Terlaksananya Kegiatan Perjalanan Dinas Biasa - Transport Peserta Pelatihan Fasilitator Perlindungan Anak																								
		Faktor Pendukung T1:	Ketersediaan Anggaran pada Tahun Anggaran 2024																								
		Faktor Penghambat T1:	Kegiatan Melibatkan narasumber Luar Daerah dan sudah dijadwalkan akan dilaksanakan pada triwulan ke 2																								
		Faktor Pendukung T2:	Sebagian anggaran bergeser menjadi Anggaran DAK Non Fisik Tahun 2024 kegiatan dengan Anggaran APBD Murni 2024 telah dilaksanakan pada triwulan ke 2 di bulan Juni 2024 dan ketersediaan Anggaran sehingga awalnya target yang dilatih 10 Orang menjadi 65 orang yang ada di 1 lembaga yaitu Lembaga Satuan pendidikan																								
		Faktor Penghambat T2:	menyusutkan jadwal kegiatan narasumber luar daerah																								
		Faktor Pendukung T3:	Sebagian anggaran bergeser menjadi Anggaran DAK Non Fisik Tahun 2024 kegiatan dengan Anggaran APBD Murni 2024 telah dilaksanakan pada triwulan ke 2 di bulan Juni 2024 dan ketersediaan Anggaran sehingga awalnya target yang dilatih 10 Orang menjadi 65 orang yang ada di 1 lembaga yaitu Lembaga Satuan pendidikan																								
		Faktor Penghambat T3:	tidak ada hambatan kegiatan sudah dilaksanakan pada triwulan 2																								
		Faktor Pendukung T4:	Ketersediaan Anggaran pada APBD Perubahan Tahun 2024																								
		Faktor Penghambat T4:	Tidak ada hambatan kegiatan dapat dilaksanakan pada triwulan 4																								
Rata-rata capaian kinerja (%)																								100	97.47		
Predikat Kinerja																								ST	ST		

LKjIP DP2PA Tahun 2024

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RPKD Kota Tahun Lalu -2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)			Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			-1	-1	-1	-2	-2	-2	-3	-3	-3	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN (PROGRAM 7)																										99.92	98.09
Predikat Kinerja																										ST	ST
2.08.2.13.0.00.04.0000	2.08.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		6,182,317,906		7,648,509,363		1,391,081,771		1,806,724,499		1,293,646,694		2,619,927,198		7,111,380,162		13,293,698,068		100	92.98						
2.08.2.13.0.00.04.0000	2.08.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		90 Nilai		0		0		91.15		0		91.15						101.28							
		Faktorisi Program Triwulan 1 :	Proses Survey Kepuasan Masyarakat masih berjalan																								
		Faktorisi Program Triwulan 2 :	Target sementara untuk semester 1, nilai akan berubah pada akhir semester 2																								
		Faktorisi Program Triwulan 3 :	Realisasi Target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tercapai di tahun 2024																								
		Faktorisi Program Triwulan 4 :	Sudah Tercapai pada Triwulan III																								
2.08.2.13.0.00.04.0000	2.08.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		88,132,420		182,410,000		0		35,820,400		62,002,304		83,061,000		180,883,704		269,016,124		100	99.16						
2.08.2.13.0.00.04.0000	2.08.1.2.01	Nilai AKIP		73,00 Nilai		68.25		0		0		68.25		0		93.49											
2.08.2.13.0.00.04.0000	2.08.1.2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	44,342,420		82,410,000	PAD	0	PAD	9720000	PAD	19350304	PAD	52246000		81,316,304		125,658,724		100	98.67						
2.08.2.13.0.00.04.0000	2.08.1.2.01.1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5 Dokumen		0		2		2		1		5						100							
		Uraian/Keterangan T1 :	-				PAD		0																		
		Uraian/Keterangan T2 :	Belanja Makanan dan Minum Rapat sudah dilaksanakan 3 kali				PAD		9720000																		
		Uraian/Keterangan T3 :	Belanja Alat Tulis Kantor [Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor]				PAD		2405000																		
		Uraian/Keterangan T4 :	-				PAD		52246000																		
		Faktor Pendukung T1 :	-																								
		Faktor Penghambat T1 :	-																								
		Faktor Pendukung T2 :	Anggaran tersedia																								
		Faktor Penghambat T2 :	-																								
		Faktor Pendukung T3 :	Anggaran yang tersedia untuk program dan sub kegiatan																								
		Faktor Penghambat T3 :	Kegiatan selanjutnya akan di laksanakan di Triwulan IV																								
		Faktor Pendukung T4 :	Anggaran Tersedia																								
		Faktor Penghambat T4 :	-																								
2.08.2.13.0.00.04.0000	2.08.1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14	29,940,000		50,000,000	PAD	0	PAD	26100400	PAD	13395000	PAD	10250000		49,745,400		79,685,400		100	99.49						
2.08.2.13.0.00.04.0000	2.08.1.2.01.6	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan		0		0		0		1		1						100							
		Uraian/Keterangan T1 :	-						0																		
		Uraian/Keterangan T2 :	Belanja Alat Tulis Kantor				PAD		22500400																		
		Uraian/Keterangan T3 :	Belanja Makanan dan Minuman Rapat [Belanja Makanan dan Minuman Rapat]				PAD		17800000																		
		Uraian/Keterangan T4 :	Belanja di Triwulan IV				PAD		10250000																		
		Faktor Pendukung T1 :	-																								
		Faktor Penghambat T1 :	-																								
		Faktor Pendukung T2 :	anggaran tersedia																								
		Faktor Penghambat T2 :	proses di e-catalogue																								
		Faktor Pendukung T3 :	Anggaran Tersedia																								
		Faktor Penghambat T3 :	Kegiatan selanjutnya akan di laksanakan di Triwulan IV																								
		Faktor Pendukung T4 :	Anggaran Tersedia																								
		Faktor Penghambat T4 :	-																								

LKjIP DP2PA Tahun 2024

Kode (Perangkat Daerah/ Ususan/ Bidang Ususan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Ususan/ Bidang Ususan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu -2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)			Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)								
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
2.08.2.13.0.00.04.0000	2.8.1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			2	50,000,000																												
2.08.2.13.0.00.04.0000	2.8.1.2.02.5	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																																
		Uraian/Keterangan T1:	Anggaran yang akan di laksanakan dalam sub kegiatan ini								PAD																							
		Uraian/Keterangan T2:	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								PAD																							
		Uraian/Keterangan T3:	Anggaran yang terealisasi di Triwulan III																															
		Uraian/Keterangan T4:	Anggaran yang terealisasi dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV								PAD																							
		Faktor Pendukung T1:	Adanya anggaran yang tersedia di sub kegiatan ini																															
		Faktor Penghambat T1:	Tidak ada hambatan																															
		Faktor Pendukung T2:	Kegiatan berjalan dengan baik karena menggunakan metode e-purchasing																															
		Faktor Penghambat T2:	Keterlambatan pengadministrasian keuangan																															
		Faktor Pendukung T3:	Anggaran Tersedia																															
		Faktor Penghambat T3:	Kegiatan belanja yang tersisa akan dilaksanakan di Triwulan IV																															
		Faktor Pendukung T4:	Anggaran yang tersedia sehingga target dapat tercapai																															
		Faktor Penghambat T4:	Tidak ada hambatan																															
Rata-rata capaian kinerja (%)																										100	91.7							
Predikat Kinerja																										ST	ST							
2.08.2.13.0.00.04.0000	2.8.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				305,949,909																												
2.08.2.13.0.00.04.0000	2.8.1.2.06	Jumlah Laporan																																
2.08.2.13.0.00.04.0000	2.8.1.2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			3	6,000,000																												
2.08.2.13.0.00.04.0000	2.8.1.2.06	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan																																
		Uraian/Keterangan T1:	Komponen Instalasi Listrik								PAD																							
		Uraian/Keterangan T2:	Komponen Instalasi Listrik								PAD																							
		Uraian/Keterangan T3:	Anggaran telah terealisasi								PAD																							
		Uraian/Keterangan T4:	Anggaran telah terealisasi dari Triwulan I sampai dengan 4								PAD																							
		Faktor Pendukung T1:	Dana Tersedia																															
		Faktor Penghambat T1:	Ada kendala pada Administrasi																															
		Faktor Pendukung T2:	Kegiatan berjalan dengan baik karena menggunakan metode e-purchasing																															
		Faktor Penghambat T2:	Keterlambatan pengadministrasian keuangan																															
		Faktor Pendukung T3:	Anggaran Terealisasi dah sudah selesai																															
		Faktor Penghambat T3:	Tidak ada hambatan karena anggaran rutin																															
		Faktor Pendukung T4:	Anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini																															
		Faktor Penghambat T4:	Tidak ada hambatan																															

LKjIP DP2PA Tahun 2024

Kode (Perangkat Daerah/ Ususan/ Bidang Ususan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Ususan/ Bidang Ususan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu -2023		Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)													
			K	Rp	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												
			-1	-1	-1	-1	-2	-2	-2	-3	-3	-3	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4												
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	1	2.06	2	Perediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor			2	70,991,435			165,800,200	PAD			0	PAD			20000000			117035000	PAD			25100000			162,135,000			233,126,435	100	97.79
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	1	2.06	2	Jumlah Paket Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan							0					1					0				1			2				100		
		Uraian/Keterangan T1:	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor,							PAD				0																						
		Uraian/Keterangan T2:	Belanja Modal Alat Pendingin							PAD				20000000																						
		Uraian/Keterangan T3:	Anggaran yang telah terealisasi di Triwulan III							PAD				137035000																						
		Uraian/Keterangan T4:	Seluruh anggaran telah terealisasi di Triwulan IV							PAD				162135000																						
		Faktor Pendukung T1:	Dana tersedia																																	
		Faktor Penghambat T1:	Aplikasi sirup belum dapat dijalankan																																	
		Faktor Pendukung T2:	Kegiatan berjalan dengan baik karena menggunakan metode e-purchasing																																	
		Faktor Penghambat T2:	Keterlambatan pengadministrasian keuangan																																	
		Faktor Pendukung T3:	Anggaran Tersedia																																	
		Faktor Penghambat T3:	Tidak ada																																	
		Faktor Pendukung T4:	Anggaran yang tersedia terhadap program dan sub kegiatan																																	
		Faktor Penghambat T4:	Tidak adanya hambatan terkait sub kegiatan ini																																	
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			5	22,544,000			22,544,000	PAD			4032000	PAD			2016000			12096000	PAD			4368000			22,512,000			45,056,000	100	99.86
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	1	2.06	4	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan							2					1					1				1			5				100		
		Uraian/Keterangan T1:	Makanan dan minuman rapat sebanyak 2 kali kegiatan							PAD				4032000																						
		Uraian/Keterangan T2:	Makanan dan minuman rapat sebanyak 1 kali kegiatan							PAD				2016000																						
		Uraian/Keterangan T3:	Anggaran yang terealisasi di Triwulan III											1008000																						
		Uraian/Keterangan T4:	Anggaran sudah terealisasi di Triwulan IV											22512000																						
		Faktor Pendukung T1:	Dana Kas tersedia																																	
		Faktor Penghambat T1:	-																																	
		Faktor Pendukung T2:	Kegiatan berjalan dengan baik karena menggunakan metode e-purchasing																																	
		Faktor Penghambat T2:	Keterlambatan pengadministrasian keuangan																																	
		Faktor Pendukung T3:	Anggaran Tersedia																																	
		Faktor Penghambat T3:	Kegiatan yang lain akan terlaksana di Triwulan IV																																	
		Faktor Pendukung T4:	Anggaran yang tersedia																																	
		Faktor Penghambat T4:	Tidak adanya hambatan karena anggaran ini bersifat rutin tiap tahunnya																																	
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			4	32,000,000			32,000,000	PAD			14773750	PAD			0			15922600	PAD			1300000			31,996,350			63,996,350	100	99.99
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	1	2.06	5	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan							4					2					1			1			0		4				100	
		Uraian/Keterangan T1:	Belanja bahan cetak sub kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan							PAD				14773750																						
		Uraian/Keterangan T2:	Belanja bahan cetak sub kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan							PAD				0																						
		Uraian/Keterangan T3:	Belanja bahan cetak sub kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan							PAD				15494100																						
		Uraian/Keterangan T4:	Anggaran di Triwulan IV Terealisasi							PAD				31996350																						
		Faktor Pendukung T1:	Tersedianya anggaran KAS																																	
		Faktor Penghambat T1:																																		
		Faktor Pendukung T2:	Kegiatan berjalan dengan baik karena menggunakan metode e-purchasing																																	
		Faktor Penghambat T2:	Kegiatan belum terlaksana, akan dilaksanakan di triwulan selanjutnya																																	
		Faktor Pendukung T3:	Anggaran Tersedia																																	
		Faktor Penghambat T3:	Tidak ada hambatan																																	
		Faktor Pendukung T4:	Anggaran yang tersedia																																	
		Faktor Penghambat T4:	Tidak adanya hambatan																																	

LKjIP DP2PA Tahun 2024

Kode (Perangkat Daerah/ Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu -2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)			Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)														
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	Sumber Dana -1	K	Rp	Sumber Dana -2	K	Rp	Sumber Dana -3	K	Rp	Sumber Dana -4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp														
2.08.2.13.0.00.04.0000	2.08.2.13.0.00.04.0000	8 Fasilitas Kunjungan Tamu			1	12.000.000			12.000.000	PAD			0	PAD			3600000	PAD			3600000	PAD			4800000	12.000.000	24.000.000	100	100											
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu						1	Laporan				0				1				0			1					100											
		Uraian/Keterangan T1:	Kegiatan sudah dilaksanakan, pembiayaan masih tertunda																																					
		Uraian/Keterangan T2:	Belanja Makanan dan Minuman Rapat																																					
		Uraian/Keterangan T3:	Anggaran yang terealisasi di Triwulan III																																					
		Uraian/Keterangan T4:	Anggaran yang terealisasi seluruhnya																																					
		Faktor Pendukung T1:	Laporan bulanan fasilitas tamu																																					
		Faktor Penghambat T1:	Terdapat hambatan pada Proses administrasi																																					
		Faktor Pendukung T2:	Kegiatan berjalan dengan baik karena menggunakan metode e-purchasing																																					
		Faktor Penghambat T2:	pengadministrasian keuangan seringkali terlambat																																					
		Faktor Pendukung T3:	Anggaran Tersedia																																					
		Faktor Penghambat T3:	Kegiatan selanjutnya akan dilaksanakan di Triwulan IV sesuai dengan anggaran kas																																					
		Faktor Pendukung T4:	Anggaran yang sudah terealisasi di Triwulan II																																					
		Faktor Penghambat T4:	Tidak ada hambatan																																					
2.08.2.13.0.00.04.0000	2.08.2.13.0.00.04.0000	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			10	162.414.474			200.000.000	PAD			22310606	PAD			0	PAD			63255774	PAD			114432728	199.999.108	362.413.582	100	100											
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											4				0				4			2					100											
		Uraian/Keterangan T1:	Perjalanan dinas yang dilakukan sesuai dengan undangan yang diterima																																					
		Uraian/Keterangan T2:	Perjalanan dinas yang dilakukan sesuai dengan undangan yang diterima																																					
		Uraian/Keterangan T3:	Anggaran yang terealisasi di Triwulan III																																					
		Uraian/Keterangan T4:	Anggaran yang sudah terealisasi Triwulan IV																																					
		Faktor Pendukung T1:	Dana tersedia																																					
		Faktor Penghambat T1:	-																																					
		Faktor Pendukung T2:	Adanya anggaran tersedia untuk kegiatan tersebut																																					
		Faktor Penghambat T2:	Pelaksanaan akan di laksanakan di triwulan 3 dan 4																																					
		Faktor Pendukung T3:	Anggaran Tersedia																																					
		Faktor Penghambat T3:	Tidak ada																																					
		Faktor Pendukung T4:	Anggaran yang tersedia																																					
		Faktor Penghambat T4:	Tidak adanya hambatan																																					
Rata-rata capaian kinerja (%)																											100	99.16												
Predikat Kinerja																											ST	ST												
2.08.2.13.0.00.04.0000	2.08.2.13.0.00.04.0000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah				84.850.000			35.000.000				0				0				35.000.000			0		35.000.000	119.850.000	100	100											
		Jumlah Pengadaan Barang											0				0				1		11		12				100											
2.08.2.13.0.00.04.0000	2.08.2.13.0.00.04.0000	5 Pengadaan Mebel			7	84.850.000			35.000.000	PAD			0	PAD			0	PAD			35000000	PAD			0	35.000.000	119.850.000	100	100											
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan											0				0				4		0		4				100											
		Uraian/Keterangan T1:	Belanja modal meja kerja pejabat																																					
		Uraian/Keterangan T2:	Belanja modal meja kerja pejabat dan kursi hadap depan meja pejabat																																					
		Uraian/Keterangan T3:	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat dan Kursi Hadap Depan Meja Pejabat																																					
		Uraian/Keterangan T4:	Anggaran yang terealisasi seluruhnya di Triwulan IV																																					
		Faktor Pendukung T1:	Dana tersedia																																					
		Faktor Penghambat T1:	Aplikasi Sirup belum ready																																					
		Faktor Pendukung T2:	akan dilaksanakan di triwulan 3 dan 4																																					
		Faktor Penghambat T2:	adanya anggaran tersedia untuk kegiatan tersebut																																					
		Faktor Pendukung T3:	Anggaran Tersedia																																					
		Faktor Penghambat T3:	Tidak Ada																																					
		Faktor Pendukung T4:	Anggaran yang tersedia untuk program dan sub kegiatan																																					
		Faktor Penghambat T4:	Tidak ada hambatan untuk sub kegiatan ini																																					

LKjIP DP2PA Tahun 2024

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu -2023		Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
			K	Rp	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			-1	-1	-1	-1	-2	-2	-2	-2	-3	-3	-3	-4	-4	-4	-4	-4						
Rata-rata capaian kinerja (%)																						100	100	
Predikat Kinerja																						ST	ST	
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		198,391,389		275,504,000		33,101,737		34,457,082		119,559,446		83,488,335		270,606,000		468,997,989	100	98.22	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan																						2	100	
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	1	2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		89,191,389		165,000,000	PAD	18401737	PAD	12307082	PAD	85759446	PAD	43738335		160,206,000		249,397,989	100	97.09	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan																						2	100	
Uraian/Keterangan T1: Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik belanja tagihan telepon, air dan listrik																						PAD	18401737	
Uraian/Keterangan T2: Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik belanja tagihan telepon, air dan listrik Bulan Maret s.d. Juni																						PAD	31639564	
Uraian/Keterangan T3: Anggaran yang terealisasi di Triwulan III																						PAD	72714846	
Uraian/Keterangan T4: Anggaran yang terealisasi di Triwulan IV																						PAD	160206600	
Faktor Pendukung T1: Anggaran tersedia																								
Faktor Penghambat T1: Tidak Ada Hambatan																								
Faktor Pendukung T2: kegiatan berjalan dengan baik karena menggunakan metode e-purchasing																								
Faktor Penghambat T2: keterlambatan pengadministrasian keuangan																								
Faktor Pendukung T3: Anggaran Tersedia																								
Faktor Penghambat T3: Anggaran yang tersisa akan dilaksanakan di Triwulan IV																								
Faktor Pendukung T4: Anggaran yang tersedia dalam program dan sub kegiatan																								
Faktor Penghambat T4: Tidak adanya hambatan karena anggaran ini bersifat rutin setiap tahunnya																								
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	1	2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		109,200,000		110,504,000	PAD	14700000	PAD	22150000	PAD	33800000	PAD	39750000		110,400,000		219,600,000	100	99.91	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan																						11	100	
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	1	2.08	Belanja jasa tenaga keamanan dan tenaga kebersihan bulan Januari, Februari, Maret						14700000						11					100		
Uraian/Keterangan T1: Belanja jasa tenaga keamanan dan tenaga kebersihan bulan Januari, Februari, Maret																						PAD	14700000	
Uraian/Keterangan T2: Belanja jasa tenaga keamanan dan tenaga kebersihan bulan April, Mei, Juni																						PAD	24650000	
Uraian/Keterangan T3: Anggaran yang terealisasi di Triwulan III																						PAD	26800000	
Uraian/Keterangan T4: Anggaran terealisasi seluruhnya di Triwulan IV																						PAD	110400000	
Faktor Pendukung T1: Anggaran tersedia																								
Faktor Penghambat T1: Anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk pemeliharaan selama satu tahun dan untuk rehabilitasi masih 0																								
Faktor Pendukung T2: adanya tenaga kebersihan/keamanan yang ahli dalam bidangnya																								
Faktor Penghambat T2: pengadministrasian keuangan seringkali terlambat																								
Faktor Pendukung T3: Anggaran Tersedia																								
Faktor Penghambat T3: Kegiatan selanjutnya akan dilaksanakan di Triwulan IV																								
Faktor Pendukung T4: Anggaran tersedia																								
Faktor Penghambat T4: Tidak ada hambatan karena anggaran ini bersifat rutin setiap tahunnya																								
Rata-rata capaian kinerja (%)																						100	98.22	
Predikat Kinerja																						ST	ST	
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		456,128,032		425,068,700		5,614,000		56,300,000		65,471,200		292,923,670		420,308,870		876,436,900	100	98.88	
Jumlah Laporan Pemeliharaan																						4	100	
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	1	2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		152,083,860		150,000,000	PAD	0	PAD	33700000	PAD	36850000	PAD	79261285		149,811,285		301,895,145	100	99.87	
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya																						13	100	
Uraian/Keterangan T1: Penyediaan Jasa „Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, yang terbayarkan uang BBM TW1 dan pajak S kendaraan																						PAD	25083685	
Uraian/Keterangan T2: Penyediaan Jasa „Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, yang terbayarkan uang BBM																						PAD	15820000	
Uraian/Keterangan T3: Anggaran yang terealisasi di Triwulan III																						PAD	29646315	
Uraian/Keterangan T4: Anggaran yang terealisasi seluruhnya berjumlah																						PAD	149811285	
Faktor Pendukung T1: Anggaran Tersedia																								
Faktor Penghambat T1: -																								
Faktor Pendukung T2: Kegiatan berjalan dengan baik karena menggunakan metode e-purchasing																								
Faktor Penghambat T2: keterlambatan pengadministrasian keuangan																								
Faktor Pendukung T3: Anggaran Tersedia																								
Faktor Penghambat T3: Tidak ada hambatan, anggaran yang tersisa akan dilaksanakan di Triwulan IV																								
Faktor Pendukung T4: Anggaran tersedia di program dan sub kegiatan																								
Faktor Penghambat T4: Tidak ada hambatan																								

B. Realisasi Anggaran

Menurut permendagri Nomor 13 tahun 2006 Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program-program dan merupakan penjabaran kebijakan OPD yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralahan sumber daya yang baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa, kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan pengeluaran (Output) dalam bentuk barang/jasa. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan suatu program atau pengeluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Belanja Tidak Langsung Menurut permendagri No 13 Tahun 2006 belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari : Belanja pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga. Idealnya belanja pemerintah yang sehat adalah porsi Belanja Tidak Langsung yang lebih kecil dibandingkan dengan porsi Belanja Langsung.

Adapun realisasi anggaran Per Sasaran dan Indikator dapat dilihat pada Tabel 16, sedangkan realisasi anggaran per Program hingga Sub Kegiatan dapat dilihat pada Tabel 17 sebagai berikut :

Tabel 16. Realisasi Anggaran per Sasaran dan Indikator Tahun 2024.

No.	Sasaran	Indikator	Program	Realisasi Anggaran
1	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 1.107.576.360.-
2			Program Perlindungan Perempuan	Rp. 1.097.703.223.-
3			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp. 520.374.231.-
4			Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp. 216.554.800.-
5			Program Pemenuhan Hak Anak	Rp. 957.832.930.-
6			Program Perlindungan Khusus Anak	Rp. 653.954.788.-
7	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 7,111.380.162.-
Total				Rp.11.665.376.494.-

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa pada tahun 2024 DP2PA Kota Samarinda telah melaksanakan Program/Kegiatan dengan jumlah anggaran Rp. 11.665.376.494 (*Sebelas Milyar Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar **94,33%**

**Tabel 17. Realisasi Anggaran per Program dan Sub Kegiatan DP2PA
Kota Samarinda Tahun 2024**

NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Pagu (Rp)		Realisasi Keuangan	
			MURNI	PERUBAHAN	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7
1	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA				
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
			100,000,000	82,410,000	81,316,304	98.67
	2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
			50,000,000	50,000,000	49,745,400	99.49
	2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
			50,000,000	50,000,000	49,822,000	99.64
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
			5,525,534,000	5,828,713,799	5,306,977,519	91.05
	2.08.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
			396,808,000	424,348,664	424,304,286	99.99
	2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				
			50,000,000	39,120,000	38,656,725	98.82
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
			6,000,000	6,000,000	6,000,000	100
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
			140,800,200	165,800,200	162,135,000	97.79
	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
			22,544,000	22,544,000	22,512,000	99.86
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
			32,000,000	32,000,000	31,996,350	99.99
	2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				
			12,000,000	12,000,000	12,000,000	100
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
			150,000,000	200,000,000	199,999,108	100

NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Pagu (Rp)		Realisasi Keuangan	
			MURNI	PERUBAHAN	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	2.08.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel				
			35,000,000	35,000,000	35,000,000	100
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
			240,000,000	165,000,000	160,206,600	97.09
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
			110,504,000	110,504,000	110,400,000	99.91
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
			150,000,000	150,000,000	149,811,285	99.87
	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
			50,000,000	50,000,000	45,455,385	90.91
	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
			25,000,000	25,000,000	25,000,000	100
	2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
			10,068,700	200,068,700	200,042,200	99.99
2	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				
	2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota				
			150,023,460	103,223,460	102,944,400	99.73
	2.08.02.2.01.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG				
			275,000,000	241,672,000	224,671,931	92.97
	2.08.02.2.01.0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG				
			175,000,000	175,000,000	170,670,700	97.53
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota				
	2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi				
			300,000,000	433,356,000	388,519,729	89.65
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				
	2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				
			125,000,000	125,000,000	124,483,000	99.59
	2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				
			99,199,800	99,199,800	96,286,600	97.06

NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Pagu (Rp)		Realisasi Keuangan	
			MURNI	PERUBAHAN	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7
3	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	160,436,000	160,436,000	147,344,818	91.84
	2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	160,436,000	160,436,000	148,691,771	92.68
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	160,436,000	160,436,000	159,092,382	99.16
	2.08.03.2.03.0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	160,439,500	122,239,500	122,027,500	99.83
4	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				
	2.08.04.2.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	136,213,000	136,213,000	133,057,144	97.68
	2.08.04.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	136,214,000	121,514,000	117,828,487	96.97
	2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				
	2.08.04.2.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	300,000,000	270,000,000	269,488,600	99.81
5	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	250,000,000	220,000,000	216,554,800	98.43
6	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				
	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	120,000,000	98,000,000	94,158,120	96.08
	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	500,000,000	402,480,000	398,708,780	99.06
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				
	2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	200,000,000	200,000,000	185,340,130	92.67
	2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150,000,000	150,000,000	137,885,700	91.92
	2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150,000,000	150,000,000	141,740,200	94.49
7	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				
	2.08.07.2.01.0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	84,000,000	84,000,000	83,172,851	99.02
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
	2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	150,000,000	235,480,000	228,900,000	97.21
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	250,000,000	187,195,000	182,456,337	97.47

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DP2PA Kota Samarinda merupakan pertanggungjawaban atas kinerja dinas dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis DP2PA Kota Samarinda 2021-2026, dimana didalamnya diuraikan tentang capaian indikator kinerja utama yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Penyusunan LKjIP tahun 2024 ini menjadi tanggung jawab DP2PA Kota Samarinda terkait pengelolaan anggaran tahun 2024 terhadap target yang telah ditetapkan dalam bentuk laporan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan pencapaian kinerja.

Pada tahun 2024 terdapat 2 sasaran strategis yang diturunkan dalam 7 Program. Seluruh program yang menjadi kinerja DP2PA Kota Samarinda di Tahun 2024 berjalan secara efektif dalam mengoptimalkan sumberdaya yang ada untuk mencapai tujuan.

Seiring dengan perkembangan kuantitas penduduk dan tuntutan peningkatan kualitas penduduk yang dinamis tentunya dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan dilakukan penyesuaian demi menjawab tantangan tersebut. Untuk mencapai kinerja yang optimal di masa yang akan datang, beberapa **rekomendasi perbaikan** yang diberikan antara lain :

- 1) Meningkatkan koordinasi internal lintas program di lingkup DP2PA dan koordinasi lintas sektor dengan instansi/*stakeholder*.
- 2) Meningkatkan koordinasi yang lebih intens lagi dengan BPKAD dan Bapperida Kota Samarinda terkait pemetaan DAK dalam aplikasi SIPD-RI untuk mempercepat proses pencairan dana DAK.
- 3) Lebih intens dalam melakukan evaluasi capaian kinerja secara periodik (triwulan), baik secara keseluruhan maupun di masing-masing bidang.
- 4) Demi mewujudkan pelaksanaan pelayanan prima diperlukan komitmen untuk melaksanakan transparansi dan akuntabilitas, baik oleh pengambilan keputusan, pimpinan unit pelaksana dan pelaksana pelayanan publik, untuk selalu berupaya memberikan pelayanan secara cepat, tepat, murah, terbuka, sederhana, dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif.
- 5) Perlu upaya pemberian pelatihan dan pemahaman yang berkesinambungan bagi penyelenggara pelayanan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai penyedia layanan yang berkualitas dengan mempedomani standar baku (SOP) dan Standar Pelayanan (SP)

dan meningkatkan kedisiplinan serta rasa tanggung jawab petugas.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2024 ini disusun untuk dapat dipergunakan sesuai peruntukannya.

Samarinda, 28 Februari 2025

**Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak**



Dr. Ibnu Araby, MM.Pd
NIP. 196707131991031013



LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2PA)
Jalan Dahlia Kompleks Balai Kota No 1 Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota
Telp/Fax (0541)743307, Telepon Pengaduan +62 823-2442-1313
Laman .http://dp2pa.samarinda.go.id Pos-el:dpppakotasamarinda@yahoo.com
S A M A R I N D A 75121

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dr. IBNU ARABY, MM.Pd**
Jabatan : **KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : **ANDI HARUN**
Jabatan : **WALIKOTA SAMARINDA.**

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2024 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



ANDI HARUN

Dr. IBNU ARABY, MM.Pd



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KOTA SAMARINDA

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	IDG	68,67
2	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	IKM	90,00

No	PROGRAM	ANGGARAN
1.	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rp. 1.124.223.260
2.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rp. 1.191.747.500
3.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Rp. 572.427.000
4.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Rp. 250.000.000
5.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	Rp. 1.120.000.000
6.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rp. 644.000.000
7.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp. 7.156.258.900

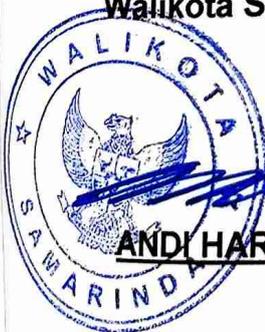
Jumlah Anggaran **Rp. 12.058.656.660**

Samarinda, Januari 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dr. IBNU ARABY, MM.Pd
NIP. 196707131991031013

Walikota Samarinda



ANDI HARUN